

Dari UNPAS Untuk Kebaikan Peradaban

Dr. H. Jaja Suteja, M.Si. CFRMDBA & Dr. H. Deden Ramdan, M.Si. CICPDBA



Kata Pengantar :

**Prof. Dr. Ir H. Eddy Jusuf Sp, M.Si.MKom
Rektor Universitas Pasundan Bandung**



UNPAS PRESS 2017

KATA PENGANTAR

Dari UNPAS Untuk Kebaikan Peradaban

Penulisan buku dengan cara mengkompilasikan berbagai artikel yang berisikan tentang berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia pada saat ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya yakin pembaca buku ini telah banyak mendapat manfaat karena meskipun bahan buku untuk pendidikan ini telah tersedia, namun ada perbedaan dalam penyajian untuk kepentingan jurnal ilmiah dan buku. Maka melalui penyusunan buku ini penulis berharap dapat diakses dan dikomunikasikan secara cermat, dikembangkan serta difasilitasi dengan berbagai perkembangan teknologi.

Penulisan sebuah buku yang bahan bakunya bersumber dari berbagai artikel yang telah dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah dan berbagai forum, serta dikumpulkan oleh Dr. H. Deden Ramden, M.Pd., dan Dr. H. Lela



UNPAS PRESS 2017

KATA PENGANTAR

Penulisan buku dengan cara mengkompilasikan berbagai artikel baik yang dimuat dalam jurnal ilmiah maupun yang dipresentasikan dalam berbagai forum ilmiah merupakan hal yang lazim dan patut dihargai. Sebab, tantangannya adalah bagaimana mengkompilasikan berbagai artikel yang "berserakan" itu menjadi pokok bahasan sebagai bagian dari sebuah buku bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Saya yakin penulis buku ini telah bekerja keras karena mekipun bahan baku untuk penulisan buku ini telah tersedia, namun ada perbedaan antara penulisan untuk kepentingan jurnal ilmiah dan tulisan untuk sebuah buku. Maka menurut penulisnya berbagai artikel lepas itu "diseleksi dan diverifikasi secara cermat, dikembangkan, serta dimodifikasi dengan mengacu perkembangan teori mutakhir".

Penulisan sebuah buku yang bahan bakunya bersumber dari kompilasi berbagai artikel yang pernah dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah dan berbagai forum, seperti yang dilakukan oleh Dr. H. Deden Ramdan, M.Si. CICP.DBA dan Dr. H. Jaja

Suteja, M.Si., CFRM.DBA mengandung nilai manfaat yang besar. Oleh karena berbagai artikel yang semula hanya dibaca atau diketahui oleh kalangan yang sangat terbatas, setelah dilakukan kompilasi secara cermat oleh penulisnya, khalayak pembacanya makin luas. Dengan kata lain, isi buku yang sekarang terdiri dari berbagai artikel lepas itu dapat “dinikmati” oleh khalayak pembaca yang lebih luas bahkan, tidak tertutup kemungkinan buku ini akan dijadikan rujukan oleh kalangan sivitas akedemika - dosen dan mahasiswa – perguruan tinggi.

Buku ini adalah buku yang komprehensif dalam bahasa Indonesia terdiri dari pokok bahasan mengenai apa bagaimana, mengapa narasi perjalanan Universitas Pasundan yang merupakan Lembaga atikan dibawah naungan Paguyuban Pasundan yang secara historis tercatat sebagai organisasi budaya Sunda yang berdiri sejak tanggal 20 Juli 1913. Dimana dalam konteks pemberdayaan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan Sekolah-sekolah Pasundan dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah lebih dari 109 sekolah bertebaran di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Sedang dalam jenjang pendidikan tinggi terdapat empat perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang signifikan.

Berdirinya Universitas Pasundan Bandung, sejak tanggal 14 November 1960 menjadi sebuah jawaban atas upaya Paguyuban Pasundan dalam mengemban misinya. Keberadaan Universitas Pasundan dengan segenap kemajuan dibidang pengelolaan manajerial Lembaga Perguruan Tinggi dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara utuh terintegrasi telah menorehkan sejumlah prestasi yang membanggakan di level lokal, nasional, regional, maupun internasional sejatinya merupakan penanda tingkat kapasitas dan kapabilitas Universitas Pasundan dalam berkarya dan berprestasi.

Di balik isi buku yang cukup komprehensif ini, menurut hemat saya yang patut diberikan penghargaan dan pujian adalah hasrat dan perilaku berbagi (*sharing behavior*) dari Dr. H. Deden Ramdan, M.Si.CICP.DBA dan Dr. H. Jaja Suteja, M.Si., CFRM.DBA selaku seorang akademisi. Melalui bukunya ini, penulis berusaha agar berbagai teori, pengetahuan, dan

pengalamannya bisa menjangkau kalangan yang lebih luas.

Perlu dikemukakan juga bahwa sebuah buku yang terutama ditujukan untuk kalangan masyarakat akademis ataupun masyarakat umum, sejauh pengetahuan saya, masih sangat terbatas, maka kehadiran buku ini secara bermakna telah memperkaya khasanah tentang narasi delektika Lembaga perguruan tinggi yang bernama Universitas Pasundan.

Sesuai dengan judulnya DARI UNPAS UNTUK KEBAIKAN PEADABAN, buku ini mengupas tentang aspek Unpas dilihat dari perspektif struktur kelembagaan, kultur, tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh segenap civitas akademika dalam mewujudkan visi dan misinya serta *sasieureun sabeunyeureun* menyebarkan nilai virus positif bagi kebaikan peradaban.

Mengenai keluasan dan kedalaman buku ini terlihat dari bagaimana usaha penulis untuk menunjukkan *state of the arts* dari setiap pokok bahasan.

Akhirnya, dengan rasa hormat saya ucapkan selamat kepada Dr. H. Deden Ramdan, M.Si. CICIP.DBA dan Dr. H. Jaja Suteja, M.Si., CFRM.DBA atas penerbitan buku ini.

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom
Rektor Universitas Pasundan Bandung

1	1	2
2	3	6
3	7	10
4	11	14
5	15	18
6	19	22
7	23	26
8	27	30
9	31	34
10	35	38
11	39	42
12	43	46
13	47	50
14	51	54
15	55	58
16	59	62
17	63	66
18	67	70
19	71	74
20	75	78
21	79	82
22	83	86
23	87	90
24	91	94
25	95	98
26	99	102
27	103	106
28	107	110
29	111	114
30	115	118
31	119	122
32	123	126
33	127	130
34	131	134
35	135	138
36	139	142
37	143	146
38	147	150
39	151	154
40	155	158
41	159	162
42	163	166
43	167	170
44	171	174
45	175	178
46	179	182
47	183	186
48	187	190
49	191	194
50	195	198
51	199	202
52	203	206
53	207	210
54	211	214
55	215	218
56	219	222
57	223	226
58	227	230
59	231	234
60	235	238
61	239	242
62	243	246
63	247	250
64	251	254
65	255	258
66	259	262
67	263	266
68	267	270
69	271	274
70	275	278
71	279	282
72	283	286
73	287	290
74	291	294
75	295	298
76	299	302
77	303	306
78	307	310
79	311	314
80	315	318
81	319	322
82	323	326
83	327	330
84	331	334
85	335	338
86	339	342
87	343	346
88	347	350
89	351	354
90	355	358
91	359	362
92	363	366
93	367	370
94	371	374
95	375	378
96	379	382
97	383	386
98	387	390
99	391	394
100	395	398

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1	PAGUYUBAN PASUNDAN DAN VISI KEBANGSAAN	1 – 6
2	MISI SUCI PAGUYUBAN PASUNDAN	7 – 12
3	SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PASUNDAN (2014)	13 – 19
4	UNPAS: SATU LANGKAH MENUJU 10 BESAR PTS TERBAIK DI INDONESIA	20 – 30
5	IKHTIAR MEWUJUDKAN PERGURUAN TINGGI YANG BERKUALITAS	31 – 38

6	MEMAKNAI DIES NATALIS KE 54 UNIVERSITAS PASUNDAN	39 – 45
7	HATURAN MAHASISWA BARU UNPAS	46 - 52
8	MEMAKNAI DIES NATALIS UNIVERSITAS PASUNDAN KE 55	53 – 58
9	IHWAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	59 – 65
10	SUKSESI KEPEMIMPINAN FAKULTAS	66 – 74
11	PERAN STRATEGIS PROGRAM STUDI	75 – 80
12	KAMPUS DAN BUDAYA LITERASI INFORMASI	81 – 87
13	FORMASI PASUNDAN DAN GERAKAN MAHASISWA	88 – 94
14	PROFESSORSHIP: DEFINISI DAN FILOSOFI	95 – 107

- 15 **POTRET DOSEN DI INDONESIA DAN MALAYSIA:** 108 – 119
mengapa kinerja mereka jauh lebih baik ?
- 16 **MASA DEPAN RISET DALAM** 120 – 128
POLITIK ANGGARAN
- 17 **MENAKAR WACANA IMPOR** 129 – 143
REKTOR
- 18 **QUO VADIS RISET KITA ?** 144 – 156
- 19 **PERLUKAH IMPOR** 157 – 169
PROFESSOR ?
- 20 **MEMBANGUN BUDAYA** 170 – 184
AKADEMIK

PAGUYUBAN PASUNDAN DAN VISI KEBANGSAAN

Oleh : Deden Ramdan

The local wisdom is the community's wisdom or local genius deriving from the lofty value of cultural tradition in order to manage the nations social order or social life.

-NN-

Bubuka

Dalam laman tercatat Paguyuban Pasundan (ejaan aslinya Paguejoeban Pasoendan) adalah organisasi budaya Sunda yang berdiri sejak tanggal 20 Juli 1913, sehingga menjadi salah satu organisasi tertua yang masih eksis sampai saat ini. Selama keberadaannya, organisasi ini telah bergerak dalam bidang pendidikan, sosial-budaya, politik, ekonomi, dalam bidang ini Paguyuban Pasundan tampaknya berusaha untuk menunjukkan kiprahnya sebagai upaya untuk mewarisi para pendahulu dimana didalam kongres ke 19 Tahun 1934 di Tasikmalaya mendirikan *Centrale Bank Pasundan*, dan kini membentuk lembaga baitul maal

serta perusahaan travel juga bidang kepemudaan dan pemberdayaan perempuan. selain berupaya untuk melestarikan budaya Sunda dengan melibatkan bukan hanya orang Sunda tapi semua yang mempunyai kepedulian terhadap budaya Sunda.

Secara historis, kelahiran Paguyuban Pasundan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908, yang dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia menggapai kemerdekaan. dan menegaskan tentang pentingnya menjaga teguh nilai-nilai kebangsaan seperti sering disampaikan oleh Ketua Umum Paguyuban Pasundan terpilih periode 2015-2020 Prof.Dr.H.Didi Turmudzi MSi. yang menekankan tentang komitmen untuk terus berjuang mengatasi masalah kebangsaan ,selaras dengan visi ketika didirikan yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki harkat dan martabat dengan memerangi kebodohan dan kemiskinan juga untuk menjaga nilai budaya sunda serta syiar islam.

Data menunjukkan kini Paguyuban Pasundan memiliki 32 kantor cabang dengan 492 anak cabang. Sedikitnya 12.300 orang terlibat dalam paguyuban ini. Pelestarian kebudayaan Sunda dalam berbagai

dimensi termasuk dalam perspektif kebangsaan di era globalisasi kini menjadi prioritas utamanya.

Penulis tertarik secara ringkas membahas tentang kiprah dalam bidang kebangsaan yang tampaknya menjadi kehirauan sekaligus salah satu *branding position* Paguyuban Pasundan sebagai organisasi yang bercorak *etnoculturalnasionalist* seperti disampaikan dalam Rekomendasi hasil kongres ke 42 yang baru selesai diselenggarakan secara hikmat di Pangandaran

Visi Kebangsaan

Sejatinya visi kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan tumbuhnya kesadaran diri sebagai warga dan kesadaran kolektif sebagai bagian dari elemen komunitas bangsa dengan berkhidmat kepada konsensus yang telah disepakati oleh *founding father* negeri ini.

Sejarah panjang perjalanan negeri ini ditandai aneka peristiwa dengan akselerasi fase waktu, dari fase pra kemerdekaan, kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, dimana setiap fase menyimpan cerita tersendiri karena melibatsertakan unsur etnis, agama, daerah dengan orientasi kepentingan personal dan

kelompok organisasi sosial kemasyarakatan fungsional dan partai politik secara elitis ataupun yang inklusif serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam catatan sejarah kesadaran kebangsaan Paguyuban Pasundan sudah muncul sebelum Indonesia merdeka, pada rapat cabang 20 Mei 1928 di Jakarta, Paguyuban Pasundan berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia tidak selamanya akan tetap dikuasai bangsa lain dan bahwa tiap orang harus berusaha menuju cita-cita bangsa dan dalam kongres berikutnya 30-1 April 1929 sikap organisasi lebih jelas lagi yaitu menegaskan bahwa orang sunda adalah bagian dari bangsa Indonesia jadi jika Paguyuban Pasundan berusaha memajukan bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan daerah tidak serta merta diartikan Paguyuban Pasundan akan memisahkan atau mengasingkan dari golongan-golongan rakyat atau wilayah yang lain selain itu sejarah membuktikan bahwa visi kebangsaan Paguyuban Pasundan pada hakikatnya memiliki visi kebangsaan progresif, karena senantiasa merespon isu-isu nasional seperti dalam kongres ke 20 di Bandung (19-22 April 1935) misalnya Paguyuban Pasundan meminta pemerintah

mengambil tindakan keras terhadap pelacuran dan mewajibkan Pengurus Besar untuk mengadakan aksi penolakan terhadap perkawinan anak-anak atau dalam kongres ke 21 memutuskan untuk mengadakan perlindungan bagi pekerja perempuan dan anak-anak serta dalam Kongres ke 25 Paguyuban Pasundan mengakui Bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu kebangsaan. (Rahim Asyik, 2015) dengan kata lain dengan terpaan sejumlah peristiwa nasional menjadikan Paguyuban Pasundan *legok tapak genteng kadek* karena teruji waktu dan ini menjadi alasan pembenar bahwa bangunan sejarah negeri ini justru menjadi kokoh dan kuat karena ditopang oleh peran serta dan kontribusi yang tiada henti diantaranya dari organisasi yang beridentitas *ethno cultural* tetapi sangat nasionalis karena berwawasan kebangsaan.

Visi kebangsaan Paguyuban Pasundan ini tampaknya terus menerus digelorakan sebagai indikator penegas bahwa organisasi yang kita cintai ini sudah melampaui kepentingan kesukuan yang sempit dan *chauvinistik* karena secara langsung ataupun tidak ini menunjukkan bahwa Paguyuban

Dari ANP-AS Untuk Kebajikan Peradaban

Pasundan senantiasa menjaga spirit *sarendeuk saigel sabobot saphanean* dengan mengedepankan nilai *Silih Asah, Silih Asih dan Silih Asuh* yang *katara ayana karasa manfaatna* dan bahkan hemat penulis langkah bermakna dari Paguyuban Pasundan ini menjadi semacam *prime mover* –penggerak pembaharu- untuk merajut kembali nilai kelindonesiaan dan nilai kebangsaan yang dalam kondisi kekinian menunjukkan terjadinya degradasi.

MISI SUCI PAGUYUBAN PASUNDAN

Oleh : Deden Ramdan

Manceggkeun adeg adeg masyarakat Sunda nu dituturuan ku ajén Budaya Sunda didadasaran ku ajén Agama Islam jeung dipayungan ku dadasar nagara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila

Bubuka

Misi utama atau misi ideal Paguyuban Pasundan tersebut merupakan gerak berkelanjutan yang tidak pernah berhenti sejak Paguyuban Pasundan berdiri hingga saat ini dan masa-masa ke depan sebagai perjuangan kolektif melalui organisasi yang diaktualisasikan dalam gerakan yang multivariasi melalui bidang pendidikan, sosial-budaya, politik, ekonomi, -dalam bidang ini Paguyuban Pasundan tampaknya berusaha untuk menunjukkan kiprahnya sebagai upaya untuk mewarisi para pendahulu dimana didalam kongres ke 19 Tahun 1934 di Tasikmalaya mendirikan *Centrale Bank Pasundan*, dan kini membentuk lembaga baitul mal serta perusahaan travel- selain kepemudaan juga dan pemberdayaan perempuan. Pada saat yang sama berupaya untuk melestarikan budaya Sunda

dengan melibatkan bukan hanya orang Sunda tapi semua yang mempunyai kepedulian terhadap budaya Sunda.

Secara historis, kelahiran Paguyuban Pasundan pada tahun 1913, yang dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia menggapai kemerdekaan. dan menegaskan tentang pentingnya menjaga teguh nilai-nilai kebangsaan, seperti sering disampaikan oleh Ketua Umum Paguyuban Pasundan Prof.Dr.H.Didi Turmudzi MSi. yang menekankan tentang komitmen untuk terus berjuang untuk mengatasi masalah kebangsaan selaras dengan visi ketika didirikan yaitu terwujudnya masyarakat indonesia yang memiliki harkat dan martabat dengan *merangan kokoro jeung kabodoan*, memerangi kebodohan dan kemiskinan juga diorientasikan untuk menjaga nilai budaya sunda dan syiar islam.

Secara esensial pendidikan nasional mempunyai misi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa

secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

Dalam konteks pemberdayaan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan Sekolah-sekolah Pasundan dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah lebih dari 109 sekolah bertebaran di wilayah Jawa Barat dan Banten. Sedang dalam jenjang pendidikan tinggi terdapat empat perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang signifikan, merupakan jawaban atas upaya paguyuban pasundan dalam mengemban misinya

Ngipuk jeung ngarojong bari terus ngajurung laku pikeun sakumna Ki Sunda ku cara mekarkeun atikan anu jembar sangkan parigel, soleh kalayan Nyunda tatakrama teuneung ludeung nyorang kahirupanana menjadi misi digagas para founding fathers Paguyuban pasundan demi terwujudnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai insan "nyunda ,nyantri dan nyantika" yaitu seorang yang memiliki karakter ki sunda dengan ciri ramah dan toleran , memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, bijak dan trampil. Sistem pendidikan inilah sebenarnya warisan yang penting untuk di eksplorasi terus sesuai dengan konteks ruang dan waktu,

adapun persoalan metode pendidikan bisa berubah selaras dengan perkembangan ilmu pendidikan secara dialektis.

Terdapat hipotesis ; Jika Paguyuban Pasundan hendak menegaskan komitmen untuk memerangi kebodohan maka ada keniscayaan untuk merumuskan bagaimana landasan filosofis pendidikannya sehingga dapat meletakkan secara ajeg bagaimana posisi lembaga-lembaga pendidikan dibidang garapan Paguyuban Pasundan dihadapan pendidikan nasional, serta kedudukannya yang strategis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga fungsinya sebagai medium pencerahan masyarakat. yang diasumsikan mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia-manusia yang unggul. Filosofi pendidikan memmanifestasikan pandangan ke depan tentang generasi yang akan dihadirkan. filosofi yang dianut dan diyakini oleh Paguyuban Pasundan adalah berdasarkan kepada memuliakan agama Islam dan melestarikan budaya sunda, maka sebagai konsekuensi logisnya, Paguyuban Pasundan berusaha untuk senantiasa berlandaskan pada

prinsip-prinsip filsafat yang diyakini dan dianutnya tersebut

Perhatian dan komitmen Paguyuban Pasundan dalam bidang pendidikan tidak pernah surut, hal ini nampak dari keputusan-keputusan yang dihasilkan dengan konsisten dalam setiap Kongres sebagai forum tertinggi organisasi Paguyuban Pasundan-selalu didawamkan agenda pembahasan dan penetapan program lima tahunan bidang pendidikan, sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Dalam sekian kali kongres dapat dilihat bahwa Paguyuban Pasundan senantiasa memiliki agenda yang jelas berkenaan dengan program pendidikan, namun agar lebih tajam tampaknya perlu ada upaya untuk melakukan *reinventing* Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Pendidikan Tinggi melalui dengan penguatan tema pokok, yaitu pengembangan kualitas dan keunggulan, pengembangan kekhasan program, dan penguatan kelembagaan yang mandiri. Tema pokok ini diimplementasikan dalam proses belajar mengajar agar secara terpadu menunjukkan aktivitas alih pengetahuan, alih metoda dan alih nilai sekaligus menegaskan posisi dan implementasi nilai Islam dan nilai kesundaan dalam seluruh sistem

pendidikan dibawah bidang garapan Paguyuban Pasundan. Menyusun *road map* Pendidikan di bidang garapan dibawah Paguyuban Pasundan yang memuat spesifikasi tiap wilayah/daerah, agar selaras dengan tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk karakter bangsa yang memparipurnakan dimensi iman, ilmu dan amal.

Misi kebangsaan Paguyuban Pasundan ini tampaknya terus menerus digelorakan sebagai ikhtiar bahwa organisasi yang kita cintai ini sudah melampaui kepentingan kesukuan yang sempit dan *provinsialistik* tetapi juga memiliki karakter egaliter karena terus menerus berupaya untuk Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia yang berkarakter , berkemampuan tinggi serta ber-akhlaq mulia.

SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PASUNDAN (2014)

Oleh : Deden Ramdan

Tanpa terasa musim penerimaan mahasiswa baru sudah tiba lagi, bagi Universitas Pasundan mengelola mahasiswa baru, tentu bukan tugas yang ringan karena harus menyelaraskan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat. dengan Visi dan Misi Unpas.

Mahasiswa baru merupakan status yang disandang oleh mahasiswa di tahun pertama kuliahnya. Memasuki dunia kuliah merupakan suatu perubahan besar pada hidup seseorang (*Santrock, 2006; Greenberg, 1999*). Biasanya individu mengalami banyak perubahan di tahun pertamanya kuliah ketika memasuki perguruan tinggi. Hal ini terkait dengan penyesuaian yang merupakan masalah berat yang harus dihadapi individu ketika memasuki dunia kuliah (*Dyson & Renk, 2006*). Adaptasi dibutuhkan karena adanya perubahan pada kehidupan individu. Yang menuntut mahasiswa baru pada tahun pertama

untuk melakukan perubahan sekaligus menyelaraskan kebiasaan, bahkan sikap dan perilakunya.

Perubahan yang terjadi dalam diri individu pada dua masa transisi tersebut, juga secara substansial terlihat dari berlakunya Sistem Kredit Semester merupakan salah satu perubahan yang dialami oleh mahasiswa tahun pertama. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program Sistem Kredit Semester ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang sesuai minat, bakat, serta kemampuannya dan mahasiswa yang berdisiplin dapat menyelesaikan program studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu tetapi juga memiliki karakter intelektualitas yang memadai

Mahasiswa secara nomenklatur merupakan suatu komunitas masyarakat yang memiliki kekhususan ketika dikomparasikan dengan komunitas masyarakat lainnya. Secara *sunatullah*, mahasiswa diposisikan sebagai kelompok intelektual yang memiliki peluang dan kesempatan untuk

mendapatkan, sejumlah fasilitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan bagi hidup dan kemanusiaan yang dalam hal tertentu tidak dimiliki oleh masyarakat kebanyakan

Sebagai komunitas masyarakat yang memiliki sejumlah *privilege*, tentunya mahasiswa memiliki fungsi tugas dan beban tanggungjawab yang wajib untuk dijalankan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai kebenaran, kearifan, dan keadilan. label mahasiswa sebagai masyarakat intelek karena tersedia media yang mendorong dan memperkuat bangunan intelektualitas. kehadirannya dalam lingkungan akademik, bersosialisasi dengan sesama masyarakat berpengetahuan, berinteraksi dengan sesama masyarakat ilmiah, melakukan curah pendapat untuk mendapatkan *evidensi* kebenaran ilmiah serta memperoleh pendidikan *hardskill* dan *softskill* dengan metode pengujian ilmiah sehingga daripadanya diharapkan akan terbangun mahasiswa dengan karakter yang *nyantri, nyunda, nyakola* dan *nyantika*

Mahasiswa dengan sejumlah stigma mulai dari agen perubahan dimana dia dituntut untuk melakukan

perubahan sosial bagi lingkungannya secara konstruktif sehingga suatu saat mahasiswa dapat menggunakan disiplin ilmunya untuk kebaikan sesama, agen sosial kontrol. diharapkan mampu menjadi katalisator atas kondisi sosial yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, selain pintar dalam bidang akademis, mahasiswa juga dituntut memiliki kepekaan atas lingkungan sekitar. Memberi sumbangsih dan karya nyata terhadap masyarakat yang bisa dirasakan manfaatnya. Bahkan, dikalangan sebagian masyarakat ada pandangan bahwa mahasiswa adalah orang yang super yang dianggap mampu memahami dan menyelesaikan segenap permasalahan yang dihadapi. Namun, sejumlah penghargaan dan kebanggan terhadap mahasiswa ternyata tidak semuanya benar adanya. merebaknya pemberitaan di media massa baik melalui media cetak, elektronik bahkan media sosial menunjukkan adanya permasalahan dari perilaku mahasiswa saat ini. sehingga citra mahasiswa kini mulai tergeser. Masyarakat merasa bahwa mahasiswa adalah *problem maker* yang sering membuat tindakan yang kontra produktif, prilakunya sering tidak sejalan dengan rasionalitas masyarakat kebanyakan Seperti terlibat narkoba, tawuran, sex bebas dan segenaap

perilaku miring lainnya atau ketika melakukan aksi demonstrasi kerap membuat macet jalan umum, tentu ini menjadi sebuah ironi karena disatu sisi mahasiswa dianggap intelek tetapi fakta yang terjadi menunjukkan keadaan sebaliknya, rendahnya nilai-nilai etika dan moralitas serta lemahnya kematangan berfikir sehingga alih-alih mendapat simpati dari masyarakat malah menjadi antipati atas tindakannya

Tentunya kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi penyandang status mahasiswa itu sendiri Sebagai garda terdepan dan penggerak pembaharu sejatinya, mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki jiwa korsa yang mumpuni, berakhlak mulia dan menjadi tauladan bagi lingkungannya dimana nantinya diasumsikan dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya di pemerintahan kelak. mampu memangku jabatan atau pekerjaan di masyarakat, memiliki jiwa kepemimpinan dan mandiri dalam memajukan ilmu pengetahuan juga teknologi serta memiliki tanggung jawab etis atas kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain mahasiswa itu merupakan investasi untuk masa depan bangsa Indonesia

Mahasiswa sebagai bagian dari elemen bangsa hampir selalu tampil sebagai penentu perubahan-perubahan besar dan penentu kecenderungan dalam kehidupan bangsa. Dalam konteks Indonesia kehadiran Soekarno, Hatta, M. Yamin dan lain –lain telah menorehkan sejarah awal mula mahasiswa sebagai artikulator dan agregator didalam memperjuangkan kemerdekaan negeri ini era 1966, 1978 sampai peristiwa 1998 yang secara monumental menghadirkan spirit reformasi yang meskipun hasilnya belum optimal tetapi sesungguhnya kondisi kekinian menunjukkan negara ini sudah mengarah kepada jalan yang benar dalam melaksanakan penghormatan atas Hak Asasi Manusia, Mengimplementasikan nilai dan prinsip-prinsip Demokratisasi dan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga nilai kesatuan dan persatuan (*unity of nations*)

Dengan demikian posisi mahasiswa sebagai calon penentu masa depan bangsa. tampaknya menjadi suatu keniscayaan karena perguruan tinggi dengan visi misi, program, sistem, prosedur dan mekanismenya diasumsikan mampu menghasilkan mahasiswa yang unggul ,memiliki integritas dan mampu

menjawab segala tantangan atas segala persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini

Melalui komitmen unsur pimpinan ,dosen dan karyawan serta dukungan segenap civitas akademiknya ,Insya Allah Universitas Pasundan selain menjawab tantangan diatas tetapi juga melaksanakan amanat untuk menjadikan mahasiswa yang luhung elmuna,pengkuh agamana dan jembar budayana

Selamat Datang Mahasiswa baru Universitas Pasundan

UNPAS: SATU LANGKAH MENUJU 10 BESAR PTS TERBAIK DI INDONESIA

Oleh : Jaja Suteja

Geliat Persaingan dalam sektor penyediaan jasa pendidikan dikalangan perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam memperebutkan “pasar” mahasiswa masih terasa sangat ketat. Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia saat ini tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini merujuk pada rekap Nasional PDPT Semester Ganjil 2017/2018 sudah mencapai 4.539 meningkat secara tajam dari tahun 2015 yang hanya 3.193 yang terdiri dari 397 (2015=121) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 4.142 (2015=3.072) PTS dengan jumlah mahasiswa sebanyak 5.269.156 orang terdiri dari mahasiswa PTN=2.029.696 dan PTS=3.239.460 mahasiswa (Ristekdikti, 2017). Sampai saat ini PTN dengan jumlah *student body* sebesar 38,52% dari jumlah *student body* nasional, tidak ada tantangan yang signifikan dengan rekrutmen mahasiswa baru, namun demikian sangat jauh berbeda dengan PTS dengan *student body* 61,48% dari jumlah mahasiswa

secara nasional tampaknya harus masih berjuang keras untuk mendapatkan mahasiswa baru.

Sebuah riset yang dilakukan oleh Knight (2011) dalam Gunarto (2016) menyatakan bahwa preferensi calon mahasiswa (konsumen) dalam memilih PT sekarang ini bukan lagi dari faktor harga (DP dan DPP), namun pilihan lebih kepada tingkat kepercayaan (*trust*), citra perguruan tinggi (*image&reputation*), kualitas pelayanan dan kepuasan dan juga tentunya kualitas akademik. Meskipun ada mitos-mitos dalam pemilihan suatu perguruan tinggi yang berkembang di beberapa Negara, namun tidak bisa digeneralisasikan. Terlepas dari riset tersebut, bagi PTS yang tidak memiliki *captive market* dan pasarnya adalah kelas ekonomi menengah bawah, maka faktor harga (dalam hal ini DP dan DPP) menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pada kondisi demikian, maka perubahan kondisi ekonomi makro akan menjadi pertarungan terbesarnya. Begitu juga dengan beberapa PT yang hanya bersandarkan pada *Physical Evidence* saja tanpa memperhatikan jaminan kualitas internal institusi, maka sulit bagi PT tersebut dapat bersaing dalam jangka panjang, fakta dilapangan membuktikan demikian, namun tentu akan

semakin dasyat lagi manakala *physical evidence* (berupa gedung modern dan sarana lainnya) tersebut bersinergi dengan kualitas akademik yang memadai.

Terlepas dari determinan pilihan PT seperti penulis sampaikan pada paragraf sebelumnya, hal penting dan pasti bahwa konsumsi informasi terkait performa PT tidak akan lepas dari publikasi Kemenristek Dikti, karena hanya institusi ini yang dapat dijadikan referensi resmi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengenai performa PT di Indonesia. Salah satu dari kebijakan yang terkait informasi performa PT adalah hasil dari proses *clustering* atau klasifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi secara nasional yang diumumkan oleh kantor Kementerian Ristek dan Dikti secara bertahap setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, proses klasifikasi tersebut mengacu kepada 4 (empat) **komponen utama**, yaitu: (i) **Sumberdaya manusia** (30%); (ii) **Kemahasiswaan** (10%); (iii) **kualitas manajemen/Akreditasi** (30%) (iv) **Penelitian dan Publikasi Ilmiah** (30%). Secara rinci komponen penilaian dapat digambarkan pada Tabel _1 sebagai berikut:

Tabel_1 Komponen Penilaian Performa PT di

Indonesia

Aspek	Indikator
Kualitas Dosen (12%)	Jumlah Dosen berpendidikan S3 / Jumlah Dosen Total
Kecukupan Dosen (18%)	Jumlah Dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar / Jumlah Dosen Total
Akreditasi (30%)	Jumlah Dosen Tetap / Jumlah Mahasiswa
Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan (10%)	Akreditasi Institusi Jumlah PS terakreditasi A dan B / Jumlah PS Total
Kualitas kegiatan Penelitian (30%)	Prestasi Mahasiswa Program Kemenristekdikti Prestasi Mahasiswa Program non-Kemenristekdikti Capaian kinerja penelitian sesuai kriteria Ditjen Riset
	Jumlah dokumen terindeks scopus / dosen tetap

sumber: Kementerian Ristek Dikti 2016

Komponen utama penilaian pada tahun 2017 ini indikator pada Kualitas SDM relatif tetap seperti yang digunakan pada tahun sebelumnya, yaitu meliputi i) presentase dosen berpendidikan S3; ii) presentase dosen dalam jabatan lektor kepala dan guru besar; iii) rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa. Indikator kualitas kelembagaan mengalami perubahan. Pada tahun sebelumnya (2016) hanya dicerminkan oleh indikator i) Akreditasi Institusi dan ii) Akreditasi Program Studi, maka pada tahun 2017 ini indikator kualitas kelembagaan ditambah dengan indikator i) jumlah program studi yang telah memiliki Akreditasi/Sertifikasi International,

dan ii) jumlah mahasiswa asing. Indikator yang mencerminkan Kualitas Kemahasiswaan tidak mengalami perubahan yaitu prestasi mahasiswa. Akan tetapi variabel yang mencerminkan prestasi mahasiswa tersebut lebih dipertajam dan diperluas, yaitu prestasi mahasiswa secara nasional dan internasional baik dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Kemenristekdikti maupun non-kemenristekdikti, juga tingkat kepedulian perguruan tinggi atau institusi terhadap kegiatan kemahasiswaan pun menjadi pertimbangan.

Sedangkan indikator yang mencerminkan Kualitas Penelitian mengalami penambahan yaitu tidak hanya i) kinerja penelitian, dan ii) rasio jumlah publikasi terindeks terhadap jumlah dosen, tetapi juga ditambah indikator terkait kinerja pengabdian pada masyarakat.

Unpas dan Hasil Pemeringkatan Performa PT 2016

Apabila kita *flash back* terhadap hasil *clustering* tahun 2016, dimana posisi Unpas berada pada *rangking*/peringkat secara umum ke-156 masuk pada cluster-3 dimana nilai terendah ada pada **komponen kemahasiswaan** yaitu sebesar 0.08, namun

komponen kemahasiswaan ini bobotnya terlalu rendah jika dijadikan ukuran, karena hanya 10% saja dari nilai secara keseluruhan, komponen ini pada tahun 2016 ada pada peringkat-87. **Komponen kedua** terkecil dikontribusi dari Penelitian dan Publikasi Ilmiah, yaitu sebesar 1.07 namun secara parsial komponen ini berada pada peringkat 75, dimana terdapat 2 (dua) indikator penting, yaitu; (i) capaian kinerja penelitian sesuai kriteria Ditjen Risbang, dan (ii) Jumlah dokumen terindeks scopus per-dosen tetap. **Komponen ketiga** adalah sumberdaya manusia, dengan bobot 30% dengan nilai 1,53 namun dari sisi peringkat secara parsial sangat buruk sehingga berada pada posisi 509, komponen ini dibangun oleh 2 indikator penting, yaitu: (i) Jumlah Dosen berpendidikan S3 per-total Dosen tetap; (ii) jumlah dosen dalam jabatan lektor kepala dan Guru Besar terhadap Jumlah Dosen tetap. **Komponen keempat** adalah Manajemen atau Akreditasi dengan nilai bobot 30% pada tahun 2016 memiliki nilai 2,72 berada pada peringkat parsial ke 233. Dari ke-empat komponen tersebut, Unpas memiliki skore total konversi sebesar 40,02 berada pada peringkat ke-156.

Unpas masuk 50 besar PT Terbaik di Indonesia dan Persiapan Tahun 2018

Belajar dari hasil pemeringkatan performa PT pada tahun 2016, serta publikasi terbaru tahun 2017 versi kemenristek Dikti dimana posisi Unpas sudah jauh lebih baik, bahkan **menduduki porsi terhormat masuk pada urutan ke-49** dari seluruh PT di Indonesia dan urutan **ke-11 PTS Terbaik Indonesia**, maka ada sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan, agar posisi tersebut dapat dipertahankan sekaligus dapat ditingkatkan pada tahun 2018, diantaranya: (i) perlu ada orientasi baru mengenai arah kegiatan kemahasiswaan, sehingga dapat menghasilkan prestasi akademik yang lebih baik lagi, melalui penjaringan kemampuan dan bakat akademik para mahasiswanya, namun tentu dengan tidak mengesampingkan prestasi non akademiknya (minat-bakat); (ii) perlu secara intens mendorong para mahasiswa untuk ikut serta secara aktif dalam *event* kompetisi akademik baik nasional regional maupun internasional, pada sisi lain bidang kemahasiswaan seyogyanya memfasilitasi mereka dengan baik; (iii) dengan dukungan dosen tetap yang cukup besar sebanyak 542 orang seharusnya dapat menghasilkan

karya produktif dosen yang sangat besar, berupa karya artikel yang ditulis dan dipublikasikan dalam jurnal bereputasi Internasional, karya buku monograph maupun buku referensi, hal ini tentu dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik antara Universitas-Fakultas dan Program Studi; (iv) bagi Dosen yang mengambil S3 dengan sumber pendanaan penuh dari institusi diwajibkan menulis dan dimuat dalam jurnal internasional bereputasi sebelum diijinkan untuk ujian sidang pendadaran, sementara 10% dosen Unpas pada semester kedua didorong untuk menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal bereputasi Internasional; (v) meningkatkan komposisi dosen dengan jabatan fungsional Lektor kepala (Lka) dan Guru Besar (GB) dari dosen dengan jabatan fungsional Lektor (Lk) dan Asisten (AA) hal ini sangat mungkin dapat dilakukan, dimana jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lk dan AA jumlahnya 154, apabila ditargetkan naik menjadi Lka sebanyak 30% saja, maka ada tambahan sebanyak 47 orang, sehingga dosen dengan jabatan LKa dan GB menjadi 200 orang.

Komponen manajemen atau akreditasi, pada tahun 2017 merupakan salah satu komponen yang memiliki

potensi berkontribusi secara maksimal. Komponen ini terdiri dari dua indikator utama, yaitu: (i) akreditasi institusi dan (ii) jumlah akreditasi Program Studi (PS) terakreditasi A dan B terhadap total jumlah program studi. Unpas memiliki jumlah program studi yang cukup banyak untuk lingkungan PTS di Jawa Barat, sampai saat ini terdapat 37 PS, 15 diantaranya terakreditasi A, dan sebanyak 18 PS terakreditasi B dan sisanya C. Berarti dalam satu tahun ini, manajemen Unpas harus mampu menargetkan untuk dapat mengurangi PS terakreditasi C setengahnya, kemudian mendorong re-akreditasi 10% prodinya untuk naik kelas menjadi A, sehingga skenario akhir komposisi kinerja manajemen sebagai berikut; PS terakreditasi A menjadi 17, sebanyak 18 prodi terakreditasi B dan hanya tersisa 2 program studi terakreditasi C. Pada sisi lain skenario tahun 2018 APT Unpas sudah meraih akreditasi "**Unggul**" atau "**A**".

Satu langkah Menuju 10 PTS Terbaik Indonesia

Apabila keempat komponen penilaian pemeringkatan versi Kemenristek dan dikti ini dikelola secara serius, tentu bukanlah hal yang tidak mungkin, unpas mampu naik kelas ke Klaster 1 (pertama) dan bukan hal yang

tidak mungkin Unpas masuk 10 besar bukan hanya pada lingkungan PTS namun pada level PT (PTN dan PTS). Klasterisasi bagi Unpas dapat digunakan sebagai refleksi dan motivasi bagi peningkatan kualitas/mutu internal, baik dari segi kualitas Sumber Daya Manusia, kurikulum, manajemen organisasi, riset, publikasi, pengabdian kepada masyarakat dan aspek lainnya.

Hasil pemeringkatan 10 besar PTS Terbaik versi Kemenristek dikti menunjukkan bahwa posisi ke-10 ditempati oleh Universitas Bina Nusantara dimana BINUS ini hanya terpaut satu angka saja dari Unpas, dimana Posisi ke 48 BINUS sementara posisi ke 49 ditempati Universitas Pasundan.

Simpulan

Tingkat persaingan untuk memperoleh mahasiswa bagi PTS masih sangat ketat, berbagai cara dilakukan agar mereka memperoleh tempat yang baik dimata konsumen, tidak terkecuali bagi Unpas. Pemeringkatan yang dilakukan oleh berbagai institusi sering menjadi acuan para pemangku kepentingan, namun publikasi yang dilakukan oleh Kemenristek Dikti menjadi acuan utama. Publikasi pemeringkatan

tahun 2017 telah menempatkan unpas pada posisi ke-49 PT dan 11 PTS Terbaik di Indonesia, untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan posisi tersebut, maka banyak langkah yang dapat dilakukan, kata kuncinya adalah terus melakukan **perbaikan-berkelanjutan** terutama pada faktor sumberdaya manusia dan Manajemen Perguruan Tinggi. Reakreditasi baik APT maupun APS untuk menaikkan *grade* menjadi salah satu instrumen penting. Sementara Akselerasi Jabatan fungsional akan meningkatkan *value* institusi, ada pekerjaan rumah untuk mengurangi dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional (tenaga pengajar) yang secara *University performance report* melemahkan tawar menawar lembaga. Pada sisi lain manajemen Unpas juga harus mencari jalan keluar bagi dosen-dosen pada posisi Lektor kepala agar dapat difasilitasi pengajuannya ke Guru Besar, semoga.***

IKHTIAR MEWUJUDKAN PERGURUAN TINGGI YANG BERKUALITAS

Oleh : Deden Ramdan

Kita menyadari bahwa perguruan tinggi mesti berbenah agar dapat berkontribusi lebih bermakna pada pembangunan. Sebagai salah satu pilar penting dari *the Triple Helix (Intellectuals, Business, and Government)*, perguruan tinggi memiliki berbagai keunggulan seperti dalam *research* yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk inovasi dan temuan ilmiah dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga untuk menopang perkembangan aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan industri serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan bangsa. Untuk itu tidak ada jalan lain perguruan tinggi harus menunjukkan kualitasnya.

Kualitas Perguruan tinggi secara normatif menurut UU 12 th.2012 disebut sebagai bentuk penjaminan mutu eksternal dimana terdapat dua jenis akreditasi yang dijalankan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yaitu akreditasi terhadap institusi

disebut Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dan Akreditasi program studi perguruan tinggi disebut Akreditasi Prodi.

Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses penilaian terhadap institusi secara keseluruhan untuk mengetahui komitmen institusi terhadap kapasitasnya dan efektivitas pendidikan didasarkan pada standar akreditasi yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap semua perguruan tinggi di Indonesia.

Evaluasi terhadap mutu kinerja institusi perguruan tinggi dilakukan melalui asesmen terhadap boring akreditasi dan laporan evaluasi diri institusi perguruan tinggi oleh tim asesor yang terdiri atas berbagai keahlian terkait yang berpengalaman dan memahami hakikat penyelenggaraan perguruan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun bidang manajemen.

Borang adalah alat untuk mengumpulkan dan mengungkapkan data dan informasi yang digunakan untuk menilai kelayakan dan mutu institusi perguruan tinggi sedangkan evaluasi-diri merupakan upaya institusi perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui

pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi sendiri. Pengkajian dan analisis itu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pakar sejawat dari luar perguruan tinggi, sehingga evaluasi-diri dapat dilaksanakan secara objektif.

Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi diakreditasi secara berkala. Sesuai dengan siklus penjaminan mutu, maka kegiatan akreditasi dimulai dengan evaluasi diri oleh institusi itu sendiri. Tim asesor melakukan asesmen kecukupan terhadap borang dan laporan evaluasi diri yang disusun oleh institusi perguruan tinggi, dilanjutkan dengan asesmen lapangan.

Standar akreditasi merupakan tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi perguruan tinggi, yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan institusi. Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian (parameter/indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan.

Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi terdiri atas tujuh buah, yaitu: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian, Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem pengelolaan, dan Penjaminan mutu, Mahasiswa dan lulusan, Sumber daya manusia, Kurikulum, Pembelajaran dan suasana akademik, Pembiayaan, Sarana dan prasarana, serta sistem informasi, Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian kepada masyarakat, dan Kerjasama (Borang AIPT,2011).

Tentu ada sejumlah pertanyaan apakah AIPT dan Akreditasi prodi berkorelasi dengan upaya mewujudkan Universitas Kelas Dunia (*World Class University-WCU*), sebenarnya arah dan formatnya sudah benar hanya tentu secara kualitatif *WCU* menekankan kepada tampilan prima dalam keseluruhan kehidupan universitas, terutama dalam hal *research* dan *teaching*. Secara rinci menurut M.Fakri Gaffar,2005 *World Class University* memiliki ciri-ciri khas sbb:

Pertama : Reputasi Internasional dalam research, dengan munculnya *stars of reseachers* yang berhasil mewujudkan *ground breaking research output*, yang

ditandai oleh diterimanya penghargaan di forum internasional;

Kedua : Reputasi Internasional dalam *teaching*, yang dibuktikan dengan adanya lulusan yang memiliki profesi dikenal secara Internasional ;

Ketiga : Berhasil menarik "*the best talents*" dalam berbagai bidang keilmuan;

Keempat : Berhasil menarik mahasiswa pascasarjana terbaik dan menghasilkan lulusan terbaik

Kelima : Berhasil merekrut banyak mahasiswa internasional terbaik;

Keenam : Memiliki *the best academic staff* karya tulis yang banyak jadi rujukan para *scholars*;

Ketujuh : Memiliki dukungan finansial yang kuat dan terus menerus, memiliki berbagai sumber dana yang besar dan memiliki *endowment fund* yang juga besar;

Kedelapan : Memiliki jurusan atau bidang keilmuan dengan reputasi internasional;

Kesembilan : Diakui secara internasional oleh masyarakat perguruan tinggi global.

Mengimplementasikannya point-point tersebut tentu berat karena sejatinya *World Class University* harus dibaca dan diberi makna sebagai sebuah harapan kehidupan masa depan bagi kemajuan peradaban umat manusia.

Untuk mewujudkan semua hal diatas bagi perguruan tinggi seperti Universitas Pasundan bukan hal mudah artinya perlu upaya yang sungguh-sungguh ,tersistemasi dan terstruktur dengan Visi dan Misi yang mendukung disertai upaya derivatif melalui Rencana Strategis (Renstra) Unpas.dari tahun 2003-2021 dengan dimulai target Pembelajaran Unggul,Pembelajaran dan Pelayanan Bermutu , menjadikan sebagai Perguruan tinggi berdaya saing Regional sampai dengan berdaya saing Internasional seraya dilengkapi dengan Rencana Operasi(Renop) dimana dengan kondisi ini meskipun sesungguhnya berat tetapi bagi Universitas Pasundan paling tidak sudah berada dalam *track* yang benar.

Apalagi dari segi manajerial Universitas Pasundan yang menyelenggarakan program Strata 1,Strata 2 dan Strata 3,dengan dukungan infra struktur yang kuat dengan sumber daya 416 Dosen diantaranya Guru besar sebanyak lebih dari 30 orang dan

S3/Doktor sebanyak 137 orang ,pengelolaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dimana sebagian besar program studi telah mencapai tingkat efesiensi internal yang baik indikator nya sebanyak 14 Prodi telah terakreditasi dengan peringkat "A" dari BAN-PT sedangkan keberadaan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) Unpas telah mendapat penghargaan keberhasilan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dari Dirjen Dikti Kemendiknas tahun 2008 Untuk menjalin jejaring dan pelaksanaan *on campus* memiliki infrastruktur *video conference/ teleconference* untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah baik diforum nasional maupun internasional dalam rangka *Online Distance Learning*,Sementara Kerjasama Internasional baik program reseach maupun teaching dilakukan dengan lebih dari 28 perguruan Tinggi Asing sedangkan Kelas Internasional telah dibuka sejak tahun akademik 2013/2014 melalui beasiswa unggulan.

Persiapan Universitas Pasundan yang tengah menghadapi Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi diharapkan menjadi momentum bagi seluruh civitas akademika untuk meneguhkan kembali komitmen

bersama seperti membangun kultur akademik, menanamkan sikap dasar seluruh unsur pimpinan dan civitas akademika dalam bentuk kesadaran, spirit dan motivasi, semangat juang, penyikapan yang benar terhadap platform lembaga, kesamaan persepsi terhadap visi, misi dan tujuan universitas masa depan.

Dimana semua ini dilakukan dengan berkelanjutan, konsisten, bergerak secara akseleratif dan pasti sehingga target untuk mendapatkan peringkat akreditasi institusi "A", obsesi untuk menjadi Universitas kelas dunia yang nota bene berkelindan dengan ikhtiar mewujudkan Universitas Pasundan dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas merupakan suatu keniscayaan, Semoga.

MEMAKNAI DIES NATALIS KE 54 UNIVERSITAS PASUNDAN

Oleh : Deden Ramdan

*Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Prof.Mr.Moh. Yamin menyetujui keinginan Suradiraja
agar Paguyuban Pasundan mendirikan Universitas
Pasundan tahun 1960- (Buku Unpas dalam
Dinamika Sejarah 1960-2014 hal.28-29)*

Lima puluh empat tahun sudah usia Universitas Pasundan yang keberadaannya dan pengembangannya tidak terlepas dari tujuan dan cita-cita Paguyuban Pasundan sebagai organisasi induk yang lahir tahun 1914, sehingga esensi dan eksistensinya tidak terlepas dari garapan pengabdian Paguyuban Pasundan terutama dalam turut mencerdaskan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dan untuk mencapai itu dilakukan upaya-upaya yang mengarah pada pemanduan dan sinergitas ilmu pengetahuan, teknologi seni dan agama secara harmonis.

Peringatan hari lahir atau dies natalis dalam diasumsikan sebagai moment krusial yang menandai titik perjalanan kehidupan. Oleh sebab itu, lazimnya

peringatan sebuah hari jadi yang senantiasa dirayakan dengan rasa syukur nikmat dan sukaria seraya berharap sejalan dengan semua itu bertambah pula tingkat kualifikasi dari berbagai dimensi dari kampus yang berhikmat kepada upaya memuliakan agama islam dan melestrarikan budaya sunda ini.

Bagi Universitas Pasundan Bandung, dies natalis yang ke 54 punya makna strategis bukan hanya secara semiotik sebagai penanda bertambahnya usia yang masuk dalam kategori usia emas , tapi juga penanda tingkat kedewasaan dalam berkarya. Keberadaan Universitas Pasundan dengan segenap kemajuan dibidang pengelolaan akademik yang ditandai dengan diperolehnya status akreditasi dengan mayoritas Status Akreditasi "A" dengan jumlah mahasiswa dan Guru besar yang terbanyak se Kopertis Jabar dan Banten.

Persaingan dalam penyediaan jasa pendidikan tinggi mengharuskan Universitas Pasundan untuk melakukan berbagai perubahan internal agar tetap eksis seperti untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara utuh dan terpadu dibentuklah beberapa lembaga yang mendukung

seperti Lembaga Penelitian ,Lembaga Pengabdian Masyarakat juga untuk mendukung Visi dan Misi dibentuk Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syi'ar Islam dan Lembaga Budaya Sunda ,selain itu sebagai upaya meningkatkan kualitas kelembagaan secara internal dan memperkuat *branding positioning* dibentuk pula Satuan Penjamin Mutu,Satuan Pengawas Internal,Pusat Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi ,Lembaga Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai ikhtiar untuk menjadikan diri sebagai perguruan tinggi yang mengarah kepada *world class university*, dan *research university*, Selain itu ,untuk bisa meraih posisi dan kondisi tersebut , Universitas Pasundan tentu dituntut untuk senantiasa terus menerus tanpa kenal henti untuk berinovasi, membangun tatakelola organisasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas civitas academica.

Dies Natalis diniscayakan menjadi momentum untuk menguatkan komitmen akan perubahan demi kemajuan segenap pihak. Oleh sebab itu tidak berlebihan kiranya jika ada kehendak untuk menegaskan dan memperteguh tentang langkah - langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari

resolusi milad ini. Artinya selain merayakan dies natalis dengan kegiatan-kegiatan seperti hiburan kesenian, pertandingan olah raga dan kegiatan non akademik lainnya yang diarahkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kultur organisasi, memperkuat tali silaturahmi diantara civitas akademika menghilangkan sekat-sekat horisontal dan vertikal sekaligus meneguhkan kohesivitas antara satu fakultas dengan fakultas lain dan antara fakultas dengan universitas dan organisasi induk Paguyuban Pasundan, membangun sportivitas, dan seterusnya. Dimana semua aktivitas itu jika dibaca merupakan sebuah wujud bentuk dari ucapan syukur kepada Allah Swt. atas pencapaian yang telah diraih.

Namun dalam sudut yang lain semua rangkaian kegiatan dies itu tentunya juga dimaknai sebagai tekad untuk membangkitkan kebanggaan sebagai keluarga besar Universitas Pasundan, Semangat sebagai suatu kolektivitas inilah yang menjadi inti dari peringatan dies natalis sebagai sebuah momentum untuk mengaktualisasikan semangat awal berdirinya Universitas Pasundan yaitu mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan

taraf kehidupan masyarakat dan menyerasikan agama dan budaya secara seimbang serta mencerdaskan warga bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu penulis mengapresiasi atas peringatan dies natalis tahun ini yang menghadirkan Orasi Ilmiah dari Guru Besar Universitas Pasundan dan Pekan Ilmiah serta kegiatan pemberian penghargaan pada Dosen Peneliti Terbaik, selain kepada Mahasiswa berprestasi dan Pemberian Penghargaan Kepada Dosen dan karyawan yang telah bersetia berbakti dan mengabdikan kepada Universitas Pasundan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan 'misi suci' itu.

Sebab sejatinya makna penting setiap memperingati Dies Natalis adalah melakukan kontemplasi dan bertindak praksis artinya selain kita harus terus merenungkan diri tentang apa, siapa, mengapa dan bagaimana membesarkan dan menjaga memelihara agar Unpas tetap berprestasi, tetapi selebihnya tampaknya kita perlu melakukan praktek dan refleksi atas apa yang telah, sedang dan yang akan dilakukan kita kedepan sehingga frase dies natalis juga dimaknai sebagai sebuah renungan yang diorientasikan untuk menjadikan kita civitas akademika untuk

seantiasa menjunjung tinggi kaidah norma dan etika ilmu pengetahuan serta memiliki moral akademik lebih baik, rendah hati dan mawas diri yang kemudian mengkrystal menjadi sosok yang Luhung Elmuna, Pengkuh Agamana dan Jembar budayana.

Dies Natalis ke 54 juga semoga dimaknai sebagai sebuah refleksi dari proses pergulatan panjang ketika Universitas Pasundan melakoni perjuangannya, seperti testimoni yang sering disampaikan Prof. Dr. H. Didi Turmudzi, M.Si. dan kemudian diperkuat pernyataan dari Rektor sekarang Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf SP. Msi .M.Kom (2014). bahwa perjalanan Unpas tidak selalu mulus dan berbunga-bunga, melainkan terdapat juga jalan terjal penuh rintangan berduri-duri, namun lanjutnya; berbekal tekad dan keuletan orang-orang yang mendapat amanat untuk menghidupkan dan membesarkannya serta keberpihakan dari sang maha pencipta alhamdulillah, Universitas Pasundan bukan saja hanya mampu bertahan melainkan juga berkembang seperti apa yang kita saksikan saat ini.

Semoga Unpas jadi batu penjur yang mampu menginspirasi dan mendorong tumbuhnya kecerdasan kolektif bangsa dan mengembangkan

manusia seutuhnya sehingga dengan usia ke 54 tahun, kampus ini menjadi cahaya yang menerangi peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan agama secara selaras juga dapat menjadi energi positif yang berguna bagi perubahan untuk kemajuan sekaligus menjawab tantangan atas permasalahan bangsa yang kompleks ini.

Wilujeng Dies Natalis Ke 54, semoga Allah Swt. senantiasa memberi berkah atas segenap ikhtiar melalui doa-doa yang didawamkan dan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang tidak henti dilakukan untuk kebesaran dan kejayaan kampus tercinta kita Universitas Pasundan, Amiin YRA.

HATURAN MAHASISWA BARU UNPAS

Oleh : Deden Ramdan

Mahasiswa menyangdang status yang berhubungan dengan ekspektasi akan sebuah sumbangsihnya bagi suatu kemajuan dan perubahan bagi bangsa ini. Mahasiswa adalah bagian dari elemen bangsa yang memiliki peran khas dan dengan kesempatan yang dimilikinya, mahasiswa diharapkan mampu memainkan peran yang bermakna ditengah masyarakat. Mahasiswa juga diasumsikan belum terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan kekuatan kelompok politik tertentu. sehingga dapat dikatakan memiliki idealisme. suatu kebenaran yang diyakini murni dari pribadi seseorang dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dapat menggeser makna kebenaran itu sendiri.

Mahasiswa adalah salah satu harapan suatu agar bangsa ini bisa menjadi lebih baik berdasarkan berbagai potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh mahasiswa, menjadi tidak etis jika mahasiswa tidak memaksimalkan diri dan hanya mementingkan kebutuhan personal tanpa memberikansumbansihnya terhadap bangsa dan negara. Mahasiswa memiliki

tempat tersendiri di lingkungan masyarakat, namun bukan berarti memisahkan diri dari masyarakat. Dia bukan menara gading yang eksklusif tetapi jadi mata air yang turut serta membantu arah perjuangan bangsa menuju sasaran yang diharapkan yaitu negara yang sejahtera dan berkeadilan.

Universitas Pasundan sebagai suatu Perguruan Tinggi memiliki visi menjadi komunitas akademi internasional yang mengusung nilai sunda dan islam di tahun 2021 menjadikan mahasiswanya untuk berfikir global dan bertindak dengan kearifan lokal (*think global and act local*) menuntut mahasiswanya untuk menjadi insan akademis yang memiliki *kepekaan sosial* dituntut senantiasa kritis dan peka terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ini akan terwujud dengan sendirinya apabila mereka menempa diri untuk terus mencari kebenaran dan keberlakuan yang bersifat ilmiah melalui ikhtiar untuk mengidentifikasi dan memahami fenomena masalah yang terjadi serta mendapatkan solusi yang pas untuk menyelesaikannya. Dan semua itu bisa diraih jika mahasiswa terus menerus mengembangkan dirinya secara utuh sehingga

mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Dengan demikian selain mapan dalam bidang akademis, mahasiswa juga diidealkan menjadi manusia pintar dalam berbagai aspek termasuk *softskill*, bersosialisasi dan memiliki kepekaan dengan lingkungan. Mahasiswa dituntut mampu selain mengkritik, tapi memberi *way out* atas kondisi sosial bangsa yang dianggap sudah tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa, Asumsi yang kita harapkan dengan perubahan kondisi masyarakat tentu akan berimbas pada perubahan bangsa. Ini berarti mahasiswa diharapkan memiliki kehirauan yang memadai sehingga mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Tugas inilah yang dapat menjadikan dirinya sebagai harapan bangsa.

Mahasiswa Universitas Pasundan oleh sebab itu dituntut menunaikan selaras dengan misinya yaitu menjaga menjaga, memelihara dan mengembangkan syiar islam dan budaya sunda, memiliki karakter yang baik, memiliki integritas dan berperan sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat. Segala tingkah laku mahasiswa akan diamati dan dinilai oleh masyarakat. Untuk itu mahasiswa harus pandai

menempatkan diri dan hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat. Sisi lain mahasiswa adalah sebagai tulang punggung bangsa di masa depan, mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Tak pelak bahwa seluruh aktivitas berkehidupan berbangsa dan bernegara bersifat mengalir, yaitu ditandai dengan pergantian sirkuler kepemimpinan organisasi oleh karena itu kaderisasi harus dilakukan terus-menerus. Dunia kampus dan kemahasiswaannya merupakan momentum kaderisasi tepat untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pada saat menjadi mahasiswa kita mendapat banyak ilmu dan pengetahuan juga, pengalaman dengan aktif melalui kegiatan intra dan ekstra kurikuler. melalui aktivitas di lembaga kemahasiswaan kampus yang bercorak penalaran dan pengkajian, minat bakat juga melatih menempa Kemandirian, Tanggung jawab serta kerja sama team dan melakukan sejumlah inovasi dan kreaativitas agar organisasi kemahasiswaan bisa lebih dinamis.

Fungsi mahasiswa yang lain adalah sebagai agen perubahan. dimana sebagai bagian dari elemen

bangsa ini, sudah sepantasnyalah jika mahasiswa menjadi garda terdepan agar bangsa ini menjadi lebih baik. artinya jika ada sesuatu yang terjadi ketidakselarasan, mahasiswa dituntut untuk melakukan tindakan bermakna sejalan dengan ekspektasi nurani bangsa dalam konteks lain mahasiswa merupakan bagian dari civitas akademika yang dalam mencari suatu kebenaran akan selalu berfikir jernih secara akademik ilmiah. ini tidak berlebihan sebab persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat, salah satu peran penting mahasiswa adalah menjaga nilai-nilai dan hak dan kewajiban warga negara untuk itu sebagai Insan akademis mahasiswa harus selalu mengembangkan dirinya sehingga mereka bisa menjadi generasi yang tanggap atas persoalan bangsa.

Hal tersebut tidak akan sulit diwujudkan jika mahasiswa senantiasa terus menerus melakukan interaksi sosial dengan masyarakat yang memiliki peran dan fungsi mahasiswa dalam masyarakat yang ditindaklanjuti dengan menganalisis masalah-masalah yang tepat, lalu menyampaikan realita yang sedang terjadi di masyarakat beserta sejumlah solusi alternatifnya.

Untuk itu sudah waktunya mahasiswa turut berperan dalam menjalankan aktivitas yang membanggakan bangsa ini. Sudah saatnyalah mahasiswa meninggalkan zona yang membuai diri seperti tindakan hedonistik, mengagungkan materi mental menerabas *hayang untung tina enteng* dan tindakan pragmatis lainnya.. tuntutan agar mahasiswa beraktivitas sesuai harapan masyarakat sebagai intelektual muda kreatif sudah semestinya menjadi keniscayaan. Praktek-praktek menggelorakan perubahan dengan cara-cara romantika mahasiswa masa silam agaknya perlu untuk di transformasikan mengikuti perubahan zaman. berkarya, dan berkontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu cara dalam mentransformasikan perjuangan mahasiswa era modern tersebut.

Upaya Mahasiswa dengan cara menebar manfaat melalui pelatihan, *workshop*, maupun pengabdian kepada masyarakat lainnya perlu digemakan sebagai indikator empati atas persoalan bangsa. Membumikan idealisme dengan tidak berhenti untuk bergerak secara dinamis melalui karya nyata adalah bentuk investasi reputasi bagi mahasiswa sekaligus

merajut prestasi bagi dirinya dan bagi kebaikan bangsa.

Universitas Pasundan sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan visi dan misinya berusaha menjadikan mahasiswanya menjadi calon sarjana yang paripurna, unggul, memiliki karakter yang *nyantri, nyunda, nyakola* dan *nyantika*, haturan mahasiswa baru Unpas selamat berfikir dan berjuang.

MEMAKNAI DIES NATALIS UNIVERSITAS PASUNDAN KE 55

Oleh : Deden Ramdan

Peringatan dies natalis, dianggap sebagai peristiwa penting yang menandai perjalanan kehidupan. dan biasanya, peringatan dies natalis itu kemudian dirayakan dengan penuh syukur dan kebahagiaan., penambahan usia bagi sebuah organisasi pun selalu dikaitkan dengan tingkat kedewasaan. apalagi bagi sebuah perguruan tinggi yang memiliki fungsi utama menghasilkan ilmuwan berkualitas. dies natalis merupakan momentum yang perlu diperingati setiap tahunnya yang merupakan refleksi,inspirasi sekaligus motivasi dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dies Natalis Univeersitas Pasundan merupakan saat dimana harus adanya evaluasi dan proyeksi atas apa yang telah sedang dan akan dilakukan dalam rentang waktu kedepan juga melalui perayaan Dies Natalis sejatinya mengingatkan tentang: penegasan mengenai arah pengembangan institusi; penyelarasan dan harmonisasi baik mahasiswa, dosen, program studi, dan universitas serta

menguatkan kembali komitmen untuk maju dan tumbuh kembang bersama sejalan dengan tantangan zaman

Lima puluh lima tahun perjalanan Universitas Pasundan telah dilalui, kampus tercinta yang berdiri tanggal 14 November 1960, dimana keberadaan dan pengembangannya tidak lepas dari tujuan dan cita-cita Paguyuban Pasundan, sebagai organisasi induk, sehingga esensi dan eksistensinya tidak terlepas dari garapan pengabdian Paguyuban Pasundan, terutama dalam menjawab tantangan *ngalawan kabodoan jeung kokoro* turut mencerdaskan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia-. Unpas telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perguruan tinggi yang membanggakan.

Dengan usia yang lebih dari setengah abad ini sekaligus menjadi penanda bahwa kampus kita ini masih memiliki daya tarik di tengah situasi menghadapi para kompetitor yaitu perguruan tinggi negeri maupun swasta di negeri ini, tantangan memang cukup berat sebab di era global termasuk meng hadapi fenomena Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) seperti sekarang, kita harus berjibaku dengan sejumlah perguruan tinggi lain yang secara rill

tampaknya berusaha untuk mensejajarkan diri bahkan "menyalip di tikungan" dengan melakukan taktik dan strategi memasarkan dan menjual institusinya agar bisa "memenangkan pertarungan" dalam rangka mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi kebanggaan masyarakat Jawa Barat yang telah banyak menghasilkan lulusan tentu universitas Pasundan senantiasa dituntut untuk terus berbenah agar selalu meningkatkan mutu pendidikannya. meskipun dalam berbagai fora berhasil melalui berbagai macam tantangan, juga mampu menunjukkan tingkat kemajuan yang bermakna dengan sejumlah prestasi yang membanggakan, sejalan dengan semangat perubahan Universitas Pasundan tetap berkomitmen memberikan standarisasi mutu layanan pendidikan yang maksimal demi kemajuan.

Namun demikian berbagai tantangan yang berkenaan dengan kemajuan dan keberhasilan para pesaing, tetap meminta kampus kita untuk senantiasa melakukan berbagai perubahan yang menjadi keniscayaan bagi sebuah perguruan tinggi yang sudah mapan dan secara evidensial mampu secara

konsisten dalam mewujudkan visi dan misinya ini, oleh sebab itu berbagai standar ideal baik yang berkategori nasional maupun standar internasional menjadi kewajiban untuk ditetapkan sebagai aturan main dalam mewujudkan Universitas Pasundan sebagai kampus dengan kategori *world class university*, dan atau *research university*, dan dalam upaya meraih prestasi penting tersebut tampaknya yang diperlukan adalah bagaimana kita melakukan sejumlah transformasi penting dalam menderivasi Tri Dharma Perguruan tinggi, dengan sejumlah perubahan gradual baik yang bersifat fisik seperti menyempurnakan sejumlah aturan standar kerja maupun psikis seperti budaya kerja sebagai upaya untuk memperkuat budaya organisasi dengan berpedoman kepada *kredo luhung elmuan, pengkuh agamana jeung jembar budayana*.

Aspek Transformasi ini menggambarkan aspek *human being* yang perlu menjadi pusat perhatian pemangku kepentingan menuju Universitas Pasundan yang lebih baik, melalui cetak biru yang berisikan tentang peta potensi, tampilan kinerja, kearifan, dan kapabilitas sumber daya

dimana semua ini menjadi landasan inti dalam mengimplementasikan proses perubahan.

Oleh sebab itu komitmen dan keterikatan pada lembaga menjadi kata kunci untuk setiap langkah perubahan, dimulai oleh langkah kecil yang akan menggerakkan langkah berikutnya. Sejalan dengan hal tersebut tampaknya yang diperlukan adalah tindakan praktek dan refleksi (praksis) guna mewujudkan perubahan secara terus menerus dan berkelanjutan. dengan memposisikan segenap civitas akademika sebagai *human investment* yang akan menjadi fondasi utama keberhasilan Unpas dalam mewujudkan perubahan yang bermakna sebagaimana telah dirumuskan dalam rencana operasional (Renop) dan Rencana Strategis (Renstra). Universitas Pasundan.

Dengan demikian Dies Natalis bisa diletakkan sebagai sebuah momentum untuk menguatkan komitmen akan perubahan demi kemajuan. Seperti yang senantiasa ditabalkan dari resolusi dies natalis itu sendiri yaitu merayakannya dengan kegiatan-kegiatan yang berifat hiburan dan sejumlah pertandingan olah raga maupun kegiatan ilmiah seperti acara yang mengarah kepada penghormatan atas nilai-nilai intelektualitas melalui kegiatan bersifat

ilmiah baik yang menghadirkan buah karya para civitas academica Universitas Pasundan maupun para undangan dengan level nasional dan internasional. Semua kegiatan itu tiada lain untuk mengapresiasi dan sekaligus refleksi atas pencapaian selama ini yang layak dan patut untuk disyukuri sebagai bagian dari upaya membangun kohesivitas dan memperkuat kebersamaan serta ikatan tali silaturahmi, mereduksi sekat-sekat antar prodi dan fakultas ,juga menciptakan fairness dan menghindari sikap *gagal faham* yang cenderung terjadi dalam dunia akademis dalam mencari nilai-nilai kebenaran yang hakiki ,dan seterusnya. Sekaligus kegiatan itu memberi makna konstuktif untuk meneguhkan upaya memuliakan agama islam dan merawat memelihara budaya Sunda sebagai ciri khas Universitas Pasundan.

Wilujeng Milad ,Mugia Allah SWT.senantiasa mendengar dan mengabulkan segenap ikhtiar dan doa-doa yang senantiasa kita dawamkan.

IHWAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Oleh : Deden Ramdan

Keputusan Politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019 diantaranya adalah Penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Kementerian itu kini bernama Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek dan Dikti).

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi -disingkat Kemenristekdikti- (dahulu Kementerian Riset dan Teknologi, disingkat Kemenristek) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi. Kemenristekdikti dipimpin oleh seorang Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Muhammad Nasir.

Secara konvensional sejumlah negara telah melakukan penggabungan antara bidang pendidikan dan riset

yang dikelola oleh satu kementerian. hal ini difahami karena pendidikan tinggi merupakan lembaga yang karena dharmanya sering melakukan penelitian, sehingga layak perguruan tinggi diposisikan sebagai basis riset. Di banyak negara maju, penggabungan kedua fungsi tersebut juga bukan hal baru. Prancis, misalnya, memiliki Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains (*Ministry of Higher Education and Science*); Jerman memiliki (*Federal Ministry of Education and Research*;) sedangkan Jepang lebih lengkap lagi berupa (*Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology*.)

Penggabungan Ristek dan Ditjen Dikti ini bermakna positif, yakni terkait kebijakan riset dan optimalisasi sumber daya agar lebih mudah. Karena selama ini riset-riset yang dilakukan perguruan tinggi dinilai tidak bersinergi dengan lembaga riset lainnya. selain itu perguruan tinggi juga dianggap tidak fokus mengembangkan riset dan teknologi. padahal sejatinya Perguruan tinggi adalah tempat pesemaian bibit-bibit pemikir, intelektual, dan profesional dengan berbagai macam jenis dan arus pemikiran keilmuan yang terus berkembang sesuai dengan fungsi utamanya yaitu membentuk kompetensi para

mahasiswa sebagai calon pemikir, ilmuwan, dan profesional yang mampu menampilkan pemikirannya secara akademis (filosofis-logis) dan mengimplementasikan dalam dunia riil termasuk dunia kerja.

Namun demikian kita perlu mencermati beberapa persoalan seperti rendahnya alokasi dana yang tersedia untuk riset: data menunjukkan anggaran riset masih di bawah 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Inilah yang belum tampak sejalan dengan kehadiran Kemenristek Dikti. lalu kita mencoba membandingkan dengan negara yang memiliki kementerian sama seperti diatas yaitu Perancis atau Jepang , dengan anggaran riset yang sudah di atas 2 persen dari PDB. Tantangan lain setelah hadirnya Kemenristek Dikti adalah mengenai eksistensi lembaga pemerintahan non kementerian yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kemenristek. apabila masih menggunakan format lama, yaitu menempatkan lembaga-lembaga itu sebagai lembaga pemerintahan nonkementerian, kehadiran Kemenristek Dikti telah keluar dari spirit sebagai sinergi lembaga-lembaga riset.

Dari ANP-45 Untuk Kebaikan Peradaban

Oleh karena itu akan lebih elok tampaknya jika lembaga-lembaga itu dimasukkan ke dalam direktorat di Kemenristek Dikti sehingga rentang kendali, baik koordinasi maupun pengawasan, lebih jelas dan terukur sehingga dengan begitu, harapan agar lembaga riset yang terintegasi dan terkoordinasi bisa menjadi kenyataan.

Dengan hadirnya Kemenristek Dikti ini pemerintah juga perlu melakukan revisi atas UU No 12/2012 tentang Dikti karena dalam UU ini disebutkan bahwa menteri yang dimaksudkan untuk mengelola pendidikan tinggi adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan saja sedangkan nomenklatur Ristek belum dicantumkan, selain itu juga secara preposisi kata seolah frase pendidikan tinggi itu merupakan subordinasi dari ristek. Kemudian dalam sudut yang lain secara kelembagaan ada persoalan tentang bagaimana posisi lembaga pendidikan tinggi keagamaan. apakah akan berada dibawah Kemenristek Dikti atau kewenangan pengaturannya tetap oleh Kementerian Agama ,tentu dari kondisi ini kita berharap aturan baru yang dibuat tidak menimbulkan ambiguitas karena tidak memperhatikan beberapa

implikasi akibat pembentukan kementerian baru tersebut.

Hal yang tidak kalah penting yaitu tentang kemauan politik dari pemerintah untuk menggunakan dan memanfaatkan hasil riset dari universitas yang masih minim. Sebagai contoh, penelitian tentang diversifikasi pertanian yang kurang direspon oleh pemerintah atau rendahnya apresiasi atas penelitian perguruan tinggi teknologi yang mengembangkan gagasan energi alternatif sebagai pengganti energi fosil. Saat ini hasil riset masih sebatas menjadi benda koleksi perpustakaan belaka.

Hal lain yaitu penerapan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi (PT) masih sedikit dimanfaatkan oleh dunia industri. Ditengarai salah satu faktor penyebabnya karena belum terjalannya jaringan yang kuat antara kedua pihak terkait, yaitu perguruan tinggi dengan pihak industri padahal seperti yang dikemukakan oleh Leydesdorff dan Etzkowitz (2001), terdapat keterkaitan kuat di antara PT, industri dan pemerintah kerap dimodelkan dengan interkoneksi yang semakin menguat dari laboratorium penghasil pengetahuan dengan para pengguna, juga dengan semakin *massivenya*

teknologi informasi dan dengan teknologi ini, interaksi antara satu organisasi dengan organisasi lain terjadi secara meluas dan bermunculannya agensi-agensi yang menjembatani proses transfer teknologi dari universitas ke industri membuat proses negosiasi teknologi terjadi dalam dua arah., Dimana dalam model ini, universitas dilihat sebagai telah mengambil peran baru (di samping peran pengajaran dan pengabdian masyarakat) yaitu peran sebagai kontributor terhadap perkembangan ekonomi. Menurut Etzkowitz, pengambilan peran baru ini, yang sering disebut *enterpreuneral university*, merupakan revolusi kedua dalam perkembangan universitas. Revolusi pertama terjadi ketika universitas yang semula hanya berperan sebagai tempat pengajaran (*Teaching University*), kemudian mengambil peran penelitian (*Research University*). Adapun faktor lainnya adalah berkaitan dengan masalah standarisasi., format standarisasi antara hasil penelitian perguruan tinggi dengan kebutuhan industri jauh berbeda.karena tidak seluruh hasil penelitian dari perguruan tinggi bisa langsung diterapkan atau digunakan oleh industri.

Untuk itu kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan industri dan disisi lain dengan pemerintah perlu terus menerus ditingkatkan. dengan menanamkan pengertian bahwa lembaga tersebut saling memerlukan. selain itu, untuk meningkatkan dalam penggunaan hasil penelitian PT oleh industri bukan hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi saja, tapi juga diperlukan kolaborasi efektif dari sejumlah kementerian. mulai dari Kementerian Industri, Perdagangan, Tenaga Kerja, dan Pendidikan. dimana sejauh ini sinergitas dari keempat kementerian dalam menangani hal ini belum ada.

Dengan demikian kehadiran Kementerian ini merupakan sebuah jawaban atas espektasi publik yang berharap adanya pendayagunaan riset dan teknologi dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) .untuk kemaslahatan dan peningkatan kesejahteraan bangsa yang berkelanjutan, Semoga.

Dari UNPAS Untuk Kebaikan Peradaban

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, fakultas mempunyai fungsi :

Pertama ; Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan akademik pada satu disiplin /cabang. disiplin ilmu /keahlian tertentu

Kedua ; Membina Dosen, Tenaga Administrasi Umum dan Keuangan

Ketiga ; Melaksanakan Pekerjaan Administrasi dan Keuangan

Kelima ; Membina dan mengembangkan penyelenggaraan identitas sebagai misi khusus universitas

Di Indonesia, Dekan (dari bahasa Belanda, *decaan*, dari bahasa Latin, *decanus*) adalah pejabat yang memimpin suatu fakultas. dimana dalam tataran praksis, ia adalah pemimpin administratif sekaligus pemimpin keakademikan di fakultasnya. Sejalan dengan perubahan masa yang begitu dinamis, di banyak perguruan tinggi Indonesia posisi dekan masa kini bahkan lebih bermetamorfosis dengan variabel yang lebih kompleks sehingga selain sebagai pemimpin dengan moral akademik yang memadai

tetapi juga dituntut memiliki karakter kepemimpinan transformatif kontingensial yang terus menerus berikhtiar bagi kemajuan dan kemaslahatan civitas akademika.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Paguyuban Pasundan, maka Dekan yang memimpin fakultas di Lingkungan Universitas Pasundan dituntut untuk melaksanakan cita-cita Paguyuban Pasundan seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga, yaitu mewujudkan masyarakat yang berbahagia dan diridhoi Allah Swt dimana untuk mencapai cita-cita tersebut sejumlah langkah dilakukan melalui upaya yang mengarah kepada harmonisasi antara ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dengan agama secara selaras dan seimbang yang jika ini berlangsung secara sinergis pada gilirannya akan menciptakan masyarakat akademik yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa, seperti mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan serta berhikmah untuk kebaikan dan keadaban bangsa Indonesia.

Sesuai dengan Statuta Universitas Pasundan berdasar SK.YPT Pasundan Nomor 447/ YPTP/ SK/A/ 2012 Organisasi Fakultas terdiri atas :

Pertama; Unsur Pimpinan: Dekan dan Wakil Dekan.

Kedua; Senat fakultas.

Ketiga; Unsur pelaksana akademik :Jurusan, Laboratorium, Perpustakaan dan Kelompok dosen.

Keempat; Unsur Pelaksana Administrasi Bagian Tata Usaha.

Secara normatif sesuai dengan statuta Universitas Pasundan , Fakultas dipimpin Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan yang terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik,Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.dimana masa bakti jabatan Dekan dan para Wakil dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan,

mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas serta bertanggung jawab kepada Rektor.

Secara substansial tugas pokok Dekan adalah menyusun, menetapkan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Operasional di tingkat fakultas yang hendak dicapai dalam masa jabatannya dengan dukungan fungsional dari para Wakil Dekan dan, Ketua Jurusan.

Tugas Pokok dan kewenangan lain dari Dekan adalah Menyusun ,menetapkan dan Melaksanakan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas dengan derivasi tugas Melakukan aktivitas *commanding* dan koordinasi dengan Wakil Dekan I, II, III, serta para Ketua Jurusan, menerima data sebagai bahan penyusunan Program Kerja dan Anggaran Tahunan yang kemudian dibahas, dipertimbang-kan lallu diputuskan untuk selanjutnya didistribusikan dan dialokasikan sesuai dengan pagu kebutuhan rill.

Tugas pokok dan kewenangan Dekan berikutnya adalah Melaksanakan dan Meningkatkan secara kualitatif pendidikan tinggi sesuai kompetensinya yang apabila di *breakdown* tugasnya meliputi; Melakukan koordinasi dengan unsur pimpinan

fakultas ,Melakukan kerjasama dengan institusi lain di bidang pengembangan pendidikan,Melakukan kegiatan dalam rangka pengembangan pendidikan serta Mendorong dan memotivasi tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan strata Pendidikan.

Mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam level lokal, nasional ,regional dan internasional 'Mengambil serta menetapkan langkah-langkah strategis dalam kegiatan tersebut,juga Mengkoordinasikan dan memantau aktivitas riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur pimpinan fakultas, Melakukan koordinasi dan, Mangambil langkah-langkah strategis dalam pembinaan civitas akademik serta Menyusun dan menyampaikan Laporan periodik kepada Rektor atas pelaksanaan tugasnya.

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pasundan 2021 yaitu Menjadi komunitas akademik peringkat internasional yang mengusung nilai islam dan sunda serta mengkapitalisasi Misi yaitu Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam level nasional,regional dan internasional serta

menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya sunda dan syiar islam maka setiap fakultas diwajibkan untuk menderivasikannya sesuai dengan karakter visi dan misi yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu tidak berlebihan kiranya jika Dekan sebagai pemimpin fakultas dalam memulai "misi sucinya" diminta untuk mendisain pola kerja yang terukur dan terstruktur sekaligus sebagai Indikator Prestasi atas pelaksanaan tugas pokoknya, seperti Mampu meghadirkan kebijakan strategis fakultas yang adaptif terhadap perubahan, Tersedianya Rencana Strategis dan Rencana Operasional, Tersedianya Program Kerja dan Anggaran Tahunan yang valid, hal lain yaitu bertumbuhnya tingkat pendidikan tenaga edukatif, tingginya tingkat kompetensi tenaga keadministrasian dan meningkatnya kemampuan peserta didik yang berkorelasi dengan tumbuhnya kiultur akademik, selain naiknya Angka Efisiensi Edukasi (AEE) secara signifikan dan meningkatnya nilai akreditasi program studi yang berkelindan dengan akreditasi institusi, juga tidak kalah penting yaitu adanya kebijakan strategis di kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta Tersedianya

kebijakan yang baku tentang model pengembangan dan pembinaan civitas akademik dengan menggeser cara pandang yang parsial menjadi simultan holistik, dari kerja soliter menjadi kerja tim dan dari penggunaan pendekatan birokratis menjadi paedagogis.

Dengan demikian terpilihnya Dekan baru sebagai pimpinan Fakultas di lingkungan kampus tercinta ini tidak saja dibaca sebagai aktivitas *bussines of usual* belaka tetapi menjadi semacam momentum untuk melahirkan sosok penggerak pembaharu (*the prime mover*) di tingkat fakultas yang selain mampu meneruskan tongkat estafeta kepemimpinan fakultas sebelumnya yang dianggap baik dan berhasil tetapi mampu bergerak akselereatif dalam mewujudkan segenap visi dan misi serta platform programnya secara utuh terintegrasi.

PERAN STRATEGIS PROGRAM STUDI

Oleh : Deden Ramdan

Universitas Pasundan kini tengah melaksanakan proses pemilihan ketua dan Sekrtetaris Program Studi dan secara prosedural tatacara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur oleh SK.Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 441/YPTP/SK /C/2012. Program Strata 1 (S1)

Organisasi Program Studi S1 adalah menyelenggarakan kegiatan administrasi dan akademik , dengan Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Program studi sebagai berikut : Menyusun Rencana dan program kerja sebagai pedoman kerja. Membuat konsep rencana pengembangan program studi sebagai bahan masukan Dekan (studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, laboran dan staf administrasi, pelatihan *soft skill* mahasiswa). Membimbing dan menilai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan program studi untuk bahan pengembangan. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan/ akademik program sarjana dalam program studi. Mengkoordinasikan pembuatan Garis Besar Program Pengajaran dan

Satuan Acara Perkuliahan . Menyusun serta mengevaluasi beban tugas mengajar dosen setiap semester. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu Program Studi. Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian dan pengumpulan soal ujian. Mengajukan usul penugasan Dosen Wali kepada Dekan, dan Mengkoordinir pelaksanaan konsultasi mahasiswa dengan pembimbing akademis. Menyusun rencana biaya operasional Program Studi per tahun berdasarkan beban kerja Program Studi dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan perkuliahan, dan yang tidak kalah penting adalah Menyusun secara komprehensif rencana kebutuhan Dosen dan tenaga administrasi Program Studi.

Tugas pokok lain adalah mengkoordinir dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan beban tugas dan keahliannya. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan prodi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Program studi di dibantu oleh Sekretaris Prodi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu Membantu menyusun bahan

konsep rencana dan program kerja tahunan Jurusan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Membantu menyusun bahan konsep rencana pengembangan prosdi (studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, laboran dan staf administrasi, pelatihan *soft skill* mahasiswa). Membantu membuat pembagian tugas perkuliahan dan beban mengajar dosen. membantu mengkoordinasikan penyusunan konsep Garis Besar Program Pengajaran dan Satuan Acara Perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menyusun instrumen monitoring pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memantau kemajuan studi mahasiswa. Mengumpulkan nilai akhir semester. Mengkoordinasi mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir dengan Dosen Pembimbing untuk kelancaran tugas akademik. Menyusun rencana pelaksanaan praktikum. Mengkoordinir ketatausahaan Jurusan dan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan Program Studi. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Program Studi (EPSBED) sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Kemudian ada hal yang menjadi tanggung jawab pimpinan program studi ini yaitu Tercapainya Key

Performance Indikator (KPI) yang target orientasinya diarahkan kepada pencapaian status akreditasi dengan nilai score tertinggi, Program Studi, dan Mengkoordinir job deskripsi ketatausahaan Program Studi dan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan Program Studi. dimana dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu kelengkapannya oleh Ketua Laboratorium, Laboran dan Staf Program studi.

Disamping Program studi terdapat nomenklatur lain seperti di Fakultas Hukum yaitu **Bagian yang berfungsi** sebagai pimpinan keilmuan di bagian.dengan tanggung jawab mengembangkan keilmuan dan sumber daya insani di bagian **Dengan tugas** : Menyusun program Kerja pengembangan keilmuan di Bagian.Menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran Bagian untuk program studi. Melaksanakan Proses pembelajaran sesuai pencapaian kompetensi di Bagian. Menyusun rencana studi lanjut di bagian.Menyusun rencana pengembangan Sumber daya di bagian.dengan kewajiban memonitoring dan mengevaluasi pencapaian program kerja di Bagian. Berkonsultasi kepada pimpinan Fakultas dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut bagian ini.

Terdapat hipotesis bahwa jika pimpinan program studi memenuhi tugas pokok dan fungsinya dengan sungguh-sungguh dengan komitmen yang tinggi terhadap kapasitas institusionalnya (*Institutional capacity*) serta memiliki komitmen yang memadai terhadap efektivitas program pendidikan (*Educational effectiveness*) maka dipastikan program studi tersebut memenuhi kualifikasi pendidikan tinggi yang bermutu tinggi karena secara utuh telah menyelaraskan visi dan misinya serta mengimplementasikan secara konsisten, menyelenggarakan tata pamong dan kepemimpinan dengan tepat, selain itu berusaha secara maksimal mendorong mahasiswa untuk senantiasa dinamis dan prestatif sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten juga profesional, hal lain pimpinan program studi berusaha secara derivatif melaksanakan program yang sudah ditetapkan sesuai arahan dari fakultas dan pimpinan universitas yang bersangkutan berdasarkan Rencana strategis dan Rencana Operasional untuk memberdayakan sumber daya manusianya dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yaitu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dalam upaya membangun *networking* yang kuat, juga

menghadirkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dan berusaha sedemikian rupa agar setiap program studi selaras dengan sistem penjaminan mutu dan manajemen informasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional.

Tentu ini tidak mudah namun demi menjadikan Universitas Pasundan sebagai perguruan tinggi yang berkualitas, hal tersebut harus menjadi kewajiban bagi program studi yang memiliki peran strategis sebagai ujung tombak sekaligus garda terdepan institusi yang kita cintai ini dalam mewujudkannya. Semoga.

KAMPUS DAN BUDAYA LITERASI INFORMASI

Oleh : Deden Ramdan

Pendidikan Tinggi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang memiliki beberapa fungsi yaitu Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, dan Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan serta menerapkan nilai Humaniora.

Pendidikan yang berkualitas menjadi kebutuhan penting di era persaingan global yang kian kompetitif. Para pengambil kebijakan di tingkat pusat pastinya sudah menyadari akan hal tersebut. Untuk menjadikan dunia pendidikan berkualitas, tentu sangat banyak faktor yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Salah satu upaya pemerintah menjadikan pendidikan berkualitas adalah melalui

meningkatkan budaya literasi informasi (membaca dan menulis).

Hubert J. Gijzen (2016) mengartikan Literasi informasi sebagai keterampilan yang mencakup kemampuan untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan, mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan beserta sumber-sumbernya, menempatkan dan mengakses informasi secara efektif dan efisien, mengevaluasi informasi secara kritis, menata dan menggabungkan informasi ke dalam pengetahuan, menggunakan informasi secara legal dan etis, dan mengkomunikasikan informasi tersebut.

Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 telah menyadari pentingnya penumbuhan karakter peserta didik melalui kebijakan membaca selama lima belas menit sebelum pelajaran dimulai. Namun untuk menyukseskan rencana besar ini, tidak bisa seperti membalikan telapak tangan dan bersifat temporer. Yang akan dibangun itu adalah kebiasaan, maka dibutuhkan suatu pembiasaan yang harus terus menerus dilakukan dan untuk itu yang diperlukan adalah suatu konsistensi. Untuk mendorong menumbuhkan kebiasaan membaca dan menulis bagi civitas akademika perguruan tinggi misalnya maka

para pemangku kepentingan harus mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh dan mengakses buku-buku. Berikan diskon harga khusus bagi dosen dan mahasiswa dalam membeli buku, dan berikan insentif untuk membantu mendorong penerbitan buku-buku yang ditulis dan dipublikasikan. Karena dosen ini menjadi role model bagi peserta didik dengan misalnya banyak menghasilkan karya berupa artikel ilmiah, populer, maupun buku-buku. Hal ini menjadi motivasi dan inspirasi tersendiri.

Di abad sekarang ini Informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia, tak terkecuali di dunia perguruan tinggi. Informasi bisa menjadi media belajar, menjadi bahan sumber penelitian, media komunikasi, dsb yang bisa menunjang proses belajar mengajar di kampus Perguruan Tinggi, dari kenyataan tersebut, dibutuhkan suatu kemudahan dalam pencarian informasi untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

Di lingkungan kampus gerakan membaca dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kembali fungsi perpustakaan. Letakkan posisi perpustakaan pada tempat strategis di lingkungan sekolah yang mudah

dilihat, terjangkau, dan menyenangkan. Selama ini posisi perpustakaan di setiap sekolah nampaknya lebih banyak di tempat-tempat yang tersembunyi, sehingga jarang dikunjungi mahasiswanya. Tujuan didirikannya perpustakaan perguruan tinggi adalah untuk mendukung, memperlancar serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program kegiatan perguruan tinggi melalui pelayanan informasi yang meliputi aspek-aspek pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan penyebaran informasi. Sedangkan peranan perpustakaan perguruan tinggi adalah sebagai sarana kelengkapan pusat suatu perguruan tinggi yang lebih bersifat akademis dalam menunjang pelaksanaan Tri Dharmanya di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Terkait dengan peran dan tugas perpustakaan perguruan tinggi, maka perpustakaan perlu melakukan program pendidikan pemakai agar bahan pustaka atau koleksi yang tersedia di perpustakaan dapat disebarluaskan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Salah satu program pendidikan pemakai yang sangat penting dilaksanakan adalah pendidikan literasi informasi. Karena literasi informasi

adalah prasyarat untuk pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) untuk semua disiplin ilmu dan tingkatan pendidikan yang memungkinkan para siswa (*learners*) memahami isi informasi secara kritis dan mengembangkan pemahaman mereka secara mandiri dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. (Arif, 2008)

Perpustakaan merupakan sumber informasi. Oleh karenanya perpustakaan merupakan jembatan bagi terjadinya proses belajar, transfer informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan apa yang dimiliki perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pemustakanya. Namun kenyataanya keberadaan, perpustakaan masih belum dimaksimalkan . Kita melihat jumlah mahasiswa dan bahkan dosen masih sedikit yang memanfaatkan tempat ini sepertinya belum ada kesadaran kolektif daari insan kampus tentang pentingnya perpustakaan sebagai wahana untuk menggali informasi seluas-luasnya dan mendapatkan pengetahuan daripadanya.

Literasi informasi merupakan salah satu program pendidikan pemakai perpustakaan (*user education programme*) bagi mahasiswa perguruan tinggi. Berbagai alasan dikemukakan mengapa

program tersebut dilaksanakan oleh perpustakaan, seperti kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan perpustakaan merupakan dasar yang amat penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan., Selain itu perpustakaan diharapkan mampu berfungsi dalam mendidik mahasiswa untuk menjadi pemustaka yang tertib dan bertanggung-jawab. Di sisi lain perpustakaan senantiasa mengupayakan agar segala kekayaan dalam bentuk koleksi, baik tercetak maupun terekam, dengan segala fasilitas dan pelayanannya, dapat digunakan secara maksimal oleh mahasiswa dan civitas akademika, aspek-aspek tersebut terintegrasi dalam kemampuan yang bersifat kognitif (teori) sebagai kemampuan dasar yang kita butuhkan setiap saat seperti di sekolah, tempat kerja antara lain berupa kemampuan memecahkan masalah, numerik dan visualisasi. Sedangkan kemampuan teknis (praktis) dapat diartikan sebagai kemampuan memahami perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan elemen teknologi digital.

Membangun budaya literasi informasi sangat dibutuhkan dalam era sekarang ini dan kampus memiliki peran strategis untuk mengimplementasikan-

Dari ANP-AIS Untuk Kebajikan Peradaban

nya dimana jika sukses maka sesungguhnya merupakan satu indikator keberhasilan kampus dalam meningkatkan kualitasnya

FORMASI PASUNDAN DAN GERAKAN MAHASISWA

Oleh : Deden Ramdan

Jumat 5 Februari 2016 di Deklarasikan organisasi Formasi Pasundan suatu organisasi yang menyiapkan kader-kader Pasundan yang merupakan unsur dari Sirung Pasundan, secara lengkap isi deklarasi tersebut sebagai berikut: Formasi Pasundan adalah organisasi yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dan akan terus-menerus diperjuangkan dan dipertahankan.. Formasi Pasundan adalah organisasi yang menyiapkan kader-kader Pasundan sebagai bagian dari Sirung Pasundan sesuai anggaran dasar Paguyuban Pasundan Pasal 13 Ayat 2 Tahun 2016., Formasi Pasundan merupakan ujung tombak mempertahankan dan membangun persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di kalangan mahasiswa dan siswa., Formasi Pasundan akan memberikan kontribusi yang nyata untuk kepentingan dan kemajuan bangsa sesuai dengan visi dan misi Paguyuban Pasundan., Formasi Pasundan selalu mengkritisi dan memberikan solusi terhadap

penyimpangan UUD 1945 dan UU turunannya., Formasi Pasundan akan senantiasa mendukung yaitu rakyat, TNI, dan Polri bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, di antaranya semangat gotong royong, tolong menolong, kemajemukan, dan akhlak mulia., Formasi Pasundan berbentuk presidium yang ketuanya dipilih setiap 2 tahun sekali.

Sebagai sebuah gerakan yang mengusung visi dan nilai etnonasionalis di forum seperti ini sejatinya merupakan kegiatan pemuda pelajar dan mahasiswa yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, forum mahasiswa yang bermetamorfosis menjadi sebuah gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa.

Secara historis Boedi Oetomo, adalah suatu wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern. Didirikan di Jakarta, 20 Mei 1908 oleh pemuda-pelajar-mahasiswa dari lembaga pendidikan STOVIA, wadah ini merupakan refleksi sikap kritis dan keresahan intelektual yang merupakan suatu episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaharu dengan kaum terpelajar dan mahasiswa sebagai aktor terdepannya, yang pertama dalam sejarah Indonesia dengan misi utamanya menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan dikalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tanggal 25 Oktober 1966 yang diikuti berbagai aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dll.

Episode berikutnya Gerakan mahasiswa yang monumental dipungkas dengan peristiwa 1998 menuntut reformasi yang pada akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Namun peristiwa ini ditandai dengan berbagai tindakan

represif yang menewaskan aktivis mahasiswa untuk meredam gerakan ini di antaranya Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi dsb.

Setelah hampir 17 tahun masa reformasi, Mitos mahasiswa sebagai *agent of change* menjauh dari realita yang ada. Para mahasiswa lebih senang dan bangga jadi pemandu sorak di acara-acara *entertain* atau duduk manis di mall atau di tempat kongkow modern yang begitu gemerlap dan jauh dari kesulitan hidup rakyat kecil. Di sana mereka dapat ringannya berbicara tentang artis idola, film populer serta trend atau mode pakaian terbaru memacetkan jalan, pada sudut di yang lain gerakan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan cenderung tersandera. Problematika tersebut bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul (*ahistoris*). Tetapi tak dapat dilepaskan pada akar sejarah. Banyak pengamat menganggap hal ini adalah buah dari terlalu lamanya gerakan mahasiswa Indonesia dalam kungkungan represi atau analisis budaya yang melihat karena pengaruh *habitus*. Namun analisis tersebut memposisikan mahasiswa sebagai makhluk yang tak bergerak yang pasif apatis padahal mahasiswa adalah manusia yang berfikir, berhasrat dan bergerak dinamis . Itu adalah

faktor eksternal sedangkan faktor internal adalah tentang dinamika gerakan di tubuh organisasi mahasiswa ini. Analisis yang lebih praktis lagi adalah ketika menganggap hal tersebut adalah faktor *moral hazard*, yang solusinya adalah penanaman nilai "ideologis" yang malah kontraproduktif karena cenderung dangkal dan pragmatis.

Dengan kata lain Gerakan mahasiswa juga harus belajar dari perjuangan gerakan mahasiswa pada masa sebelumnya. Mereka harus bersikap ajeg dengan berbagai kajian dan tidak hanya heboh dengan selebrasi politik akan tetapi bergerak dalam aksi nyata. Artinya, gerakan mahasiswa selain berkuat dengan teori, mereka harus turun ke massa rakyat melalui strategi *down to earth* dengan melakukan aktivitas sosial-politik demi menciptakan kesadaran politik pada khalayak dengan keyakinan atas kekuatannya. Melakukan berbagai kajian dan membentuk lembaga kader yang berfungsi untuk mendorong terciptanya regenerasi kepemimpinan kedepan.

Mahasiswa dicitrakan sebagai kekuatan moral yang bebas dari kepentingan politik praktis dengan melancarkan kritik sosial. Dengan asumsi mahasiswa

sebagai kaum intelektual dalam hubungannya dengan Rakyat, TNI dan Polri yang harusnya memang menjadi kawan sejati dalam berjuang melawan kemiskinan dan kebodohan misalnya.

Oleh sebab itu yang diperlukan adalah soal *positioning* dimana posisi mahasiswa dalam masyarakat dan sejauh mana partisipasi dan kontribusinya atas persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat, hal ini penting sebab, selama ini, dalam pengamatan, gerakan mahasiswa selalu mengatasnamakan rakyat tanpa jelas betul rakyat mana yang dimaksud. dalam beberapa hal, rakyat tak mengerti apa yang mahasiswa suarakan,. kondisi tersebut pada dasarnya merupakan derivasi dari segala atribut yang menempel pada gerakan mahasiswa selama ini: bahwa mahasiswa adalah agen perubahan, pemimpin masa depan, kelas menengah sejati, agen kontrol sosial dan lain sebagainya. Padahal, atribut yang menempel pada mahasiswa tersebut bisa jadi merupakan sebuah konstruksi sosial yang sengaja diciptakan penguasa, utamanya oleh Orde Baru, dan telah menjadi mitos dalam gerakan mahasiswa. Dalam posisi ini belajar dari kekurangan terdahulu Strategi untuk berjuang

bersama di tengah masyarakat diasumsikan mampu melampaui kepentingan masing-masing kelompok entitas dan lainnya, ini sekaligus digunakan sebagai fondasi untuk memperkuat kebijakan pemerintah Indonesia saat ini.

Formasi Paguyuban Pasundan ini tampaknya bisa menjawab segenap persoalan diatas dengan catatan agar tidak *overlapping* harus melakukan berbagai konsolidasi intens untuk menyamakan langkah dan persepsi diantara lembaga kemahasiswaan di lingkungan Pendidikan Tinggi Pasundan, juga menetapkan *platform* organisasi serta merumuskan cetak biru program yang tersistemasi dengan target yang jelas dan terukur dalam upaya memberikan kontribusi yang nyata bagi kepentingan dan kemajuan bangsa selaras dengan Visi dan Misi Paguyuban Pasundan.

PROFESSORSHIP: DEFINISI DAN FILOSOFI

Oleh : Jaja Suteja

Sangat jelas dikemukakan apa yang menjadi ekspektasi publik dari eksistensi kementerian Riset Teknologi dan Direktorat Pendidikan Tinggi sebagai lembaga kementerian hasil merger dari dua institusi ini (Kantor kementerian Riset Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi). Hal tersebut tertuang dalam rencana strategis Kantor Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015–2019. Substansi mendasar yang diusung yaitu diperlukan sebuah reformasi pendidikan tinggi termasuk didalamnya restrukturisasi kelembagaan (struktur organisasi Kementerian baru), sehingga Perguruan Tinggi di Indonesia disamping menghasilkan lulusan, riset, transfer teknologi ke masyarakat, perguruan tinggi juga menghasilkan inovasi yang bisa meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, universitas yang baik seharusnya memiliki;

- (i) penelitian yang berkualitas, (ii) paten dan publikasi,
- (iii) banyaknya jurnal yang dikutip serta sitasi atau

citable documents (iv) sejumlah guru besar yang produktif dalam publikasi ilmiahnya.

Pembinaan Karir Dosen

Menurut Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal-1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tridarma PT). Kewajiban dosen baik secara perseorangan maupun berkelompok wajib menulis buku ajar/buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika. Hasil Penelitiannya wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia,

mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum.

Dalam prakteknya ekspektasi implementasi riset baik dari sudut pandang kuantitas maupun kualitas untuk kelancaran darma riset ini seringkali terkendala oleh anggaran penelitian. Apabila kita buka data statistik, maka pos anggaran untuk riset di Indonesia masih relatif kecil, yakni hanya 0,009 persen dari produk domestik bruto (PDB). Idealnya kira-kira 1,5 persen dari PDB. Sedangkan Malaysia serta Thailand ada diangka satu persen, Singapura dua persen, sudah barang tentu ini adalah pekerjaan rumah yang berat, apabila hanya bertumpu pada aspek *budgeting* saja. Menyikapi fakta empiris dilapangan, maka dibutuhkan revitalisasi fungsi dan peran PT antara lain: (i) Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (ii) Peningkatan kemanfaatan penelitian, (iii) Peningkatan dana penelitian. Data menunjukkan bahwa sampai saat ini pemerintah hanya mengalokasikan 30% dari dana bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk kegiatan penelitian dosen dengan tingkat penyerapan masih jauh dibawah pagu tersebut. Hal yang sangat memprihatinkan adalah kondisi yang

terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) walaupun tidak semuanya, pada umumnya mereka masih berjuang untuk dapat bertahan hidup ditengah pahit getirnya persaingan untuk mendapatkan mahasiswa baru yang semakin sulit, alih alih alokasi dana riset menjadi prioritas yang ke sekian, itu juga kalau masih tersisa dari pos belanja rutin serta investasi sarana dan prasarana.

Sudah tidak ada tawar menawar lagi, dosen dituntut untuk bisa merancang dan melakukan penelitian ilmiah, sekaligus terampil dalam menulis. Karier dosen adalah "***career by research***". Artinya karier dosen itu harus ditempuh melalui penelitian. Semakin produktif dosen dalam penelitian maka semakin cemerlang kariernya, bahkan bisa segera mencapai puncak karier tertinggi yakni Guru Besar atau *profesor*.

Definisi Profesor

Masyarakat masih sering salah kaprah dalam memaknai *profesor* dengan menganggap predikat tersebut sebagai gelar. Padahal, *profesor* adalah sebuah jabatan. Dalam sebuah Perguruan Tinggi, kehadiran *profesor* sangat menentukan akreditasi

institusi tersebut. Jabatan akademik *profesor*, merupakan jabatan sangat terhormat bukan hanya di Indonesia akan tetapi juga di semua perguruan tinggi di seluruh dunia. *Profesor* sangat berperan menghasilkan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Bukan sekadar penemuan biasa, namun penemuan yang menghasilkan hak paten. Tentu ini bukanlah perkara mudah, sehingga mohon maaf **jabatan profesor** hanya **cocok** bagi dosen yang memiliki **dedikasi tinggi** terhadap ilmu pengetahuan.

Menurut Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 49 dijelaskan bahwa *profesor* merupakan jabatan akademik tertinggi yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang fungsinya sebagai ***guardian of academic and scientific value***, *Profesor* memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan nasional, memimpin kelompoknya untuk memecahkan masalah nasional dan berperan di tingkat internasional. Bagi akademisi/dosen, menjadi Guru Besar (*professor*) merupakan impian tertingginya. Perlu 4 (empat) anak tangga untuk mencapai gelar *profesor*, yakni: melalui jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala,

baru kemudian *Profesor*. Syarat mutlak untuk menjadi seorang *profesor* adalah harus berpendidikan Doktor (S3) serta menghasilkan karya tulis yang dipublish di jurnal Internasional yang bereputasi, selain menulis di jurnal nasional terakreditasi dikti dalam lingkup bidang keahliannya.

Jika idealnya setiap program studi/jurusan memiliki satu orang *Profesor*, maka dibutuhkan dua puluh dua ribu *profesor*. Data PDPT menunjukkan bahwa hanya ada 5.304 *profesor*, berarti sekitar tujuh belas ribu program studi/departemen yang tidak memiliki Guru Besar, kepatutannya di beberapa negara yang sudah maju, maka pada umumnya kepala departemen adalah seorang *profesor*. Masih menurut DSID Kementerian Ristek dan Dikti diperkirakan sekitar 17% Guru Besar yang ada akan memasuki masa pensiun/*Professor emeritus*, hal ini berarti jumlahnya akan semakin menyusut. Kondisi demikian tidak berbanding lurus dengan penambahan *profesor* baru.

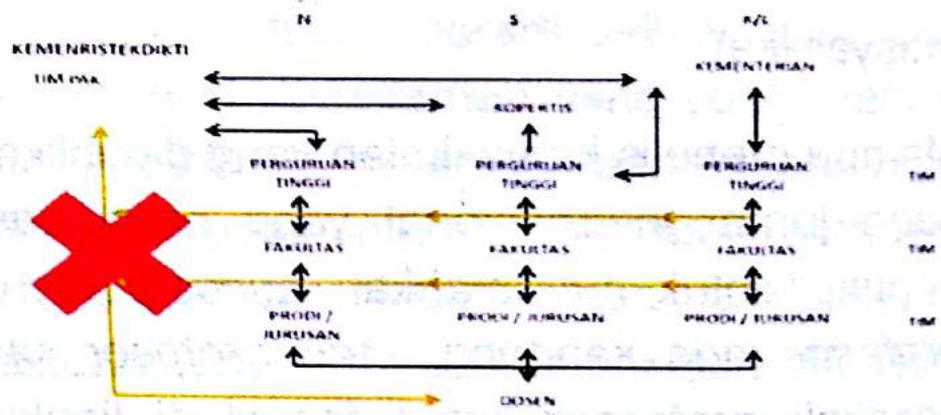
Kriteria *Profesor*

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 Tahun 2014, maka Kriteria seorang *Profesor* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mampu mendidik secara profesional, hal ini dimaksudkan bahwa seorang Guru Besar harus menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang berkualitas, sekaligus sosok yang dijadikan contoh/panutan oleh para juniornya.
2. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional yang bereputasi. Ini penting untuk mematahkan *mindset* mengenai *profesor* jago kandang, atau profesor karbitan sesekali *professor* harus tampil di lingkungan masyarakat akademik global sebagai sosok kesatria dalam ilmu pengetahuan.
4. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus .

**Mekanisme Pengusulan Jabatan Akademik
Profesor**

Perlu dipahami bagaimana alur atau proses yang harus dilalui oleh para dosen atau *faculty staff members* agar kegiatan yang bersifat teknis tidak menjadi kendala, sehingga kandidat *profesor* lebih fokus kepada pemenuhan kriteria substansi dasarnya, peraga berikut ini menjelaskan bagaimana langkah pengajuan dokumen serta bagian atau departemen mana saja yang harus dilewati baik untuk PTN, PTS maupun PTK/L.



Peraga_1 Diagram Alur Tata Kelola Layanan Kenaikan Jabatan/GB

Penjaminan Mutu Ke-profesor-an

Agar kandidat guru besar yang diusulkan ini menjadi sosok panutan dan dapat menjadi tolok ukur kinerja dan mampu menciptakan atmosfir akademik, oleh karena itu proses pengusulan seorang guru besar

haruslah memperhatikan kualitas proses, prosedur serta keterandalan, berikut deskripsi penjaminan kualitas ke-*profesor-an*:

1. Karya ilmiah harus dinilai oleh 2 (dua) orang pakar sesuai bidang ilmu dengan pangkat/jabatan akademik yang setara atau lebih tinggi.
2. Karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik *Profesor* dilakukan penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) *Profesor* dari perguruan tinggi lain
3. Profil *Profesor* yang disetujui dan karya ilmiahnya sebagai syarat khusus *Profesor* ditampilkan pada laman Kemristekdikti.

Untuk mempermudah layanan dan mengurangi hambatan birokrasi serta efisiensi biaya dalam proses pengajuan guru besar, maka sejak tahun 2015 pengajuan guru besar relatif lebih sederhana dengan sistem *On-line* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek Dan Dikti No. 1864/E4/2015 pengajuan guru besar bersifat *Paperless* dengan lama waktu layanan maksimum 120 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:

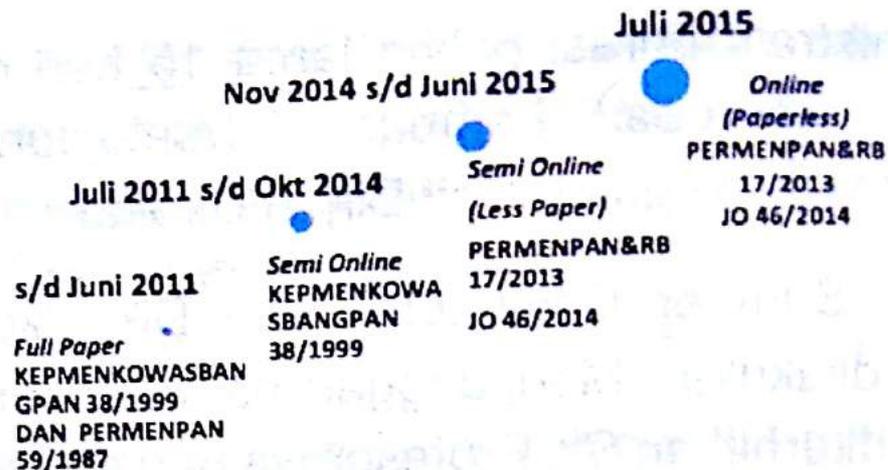
Dari ANPAS Untuk Kebaikan Peradaban

1. Jurusan atau fakultas dengan usulan, proses pemeriksaan, validasi dan pertimbangan atau persetujuan senat, durasi waktu paling lama 30 hari kerja dengan luaran berkas/DUPAK yang sudah disetujui pimpinan jurusan atau fakultas
2. Perguruan Tinggi atau Kopertis dengan kegiatan yang dikerjakan adalah membuat usulan, proses penilaian, pemeriksaan, validasi oleh Tim Penilai Perguruan Tinggi dan pertimbangan atau persetujuan senat Perguruan Tinggi semua dokumen dalam bentuk kertas berakhir disini, durasi paling lama 30 hari kerja dengan luaran berkas atau DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Perguruan Tinggi .
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan kegiatan yang dilakukan yaitu memproses, melakukan penilaian, pemeriksaan/*review*, validasi oleh Tim Penilai Pusat dan Persetujuan Dirjen/Direktur, durasi paling lama 30 hari kerja luaran yang dihasilkan Lembar Persetujuan dan Penetapan Angka Kredit Dirjen atau Direktur.
4. Kementerian atau Biro kepegawaian, kegiatan yang dilakukan Proses pemeriksaan, validasi

administratif durasi paling lama 15 hari dengan luaran berupa Lembar Persetujuan dan Penetapan Angka Kredit Dirjen/Direktur

5. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, kegiatan yang dilakukan Mengunggah nama dosen yang telah diterbitkan SK Profesornya dan daftar karya ilmiah untuk pemenuhan syarat utama *Profesor* di laman <http://pak.dikti.go.id/portall> durasi paling lama 15 hari dengan luaran Daftar nama dan karya ilmiah .

Peraga berikut ini akan menjelaskan bagaimana proses pentahapan (*milestone*) dari *time horizon* perjalanan sistem pengajuan dokumen jabatan fungsional dosen mulai periode berbasis dokumen fisik tahun 2011 sampai dengan pengajuan jabatan fungsional yang bersifat *paperless/online* berdasarkan PERMENPAN & RB 17/2013 JO 46/2014 yang diperkuat dengan Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek Dan Dikti No. 1864/E4/2015:



Peraga_2 Pentahapan Prosedur Pengusulan Dokumen Jabatan Fungsional Dosen

Bukan Tujuan Akhir

Laksana padi, semakin berisi semakin merunduk. Pepatah ini paling tepat untuk menggambarkan sosok seorang **profesor**. Kita tahu bahwa *profesor* merupakan jabatan akademik tertinggi. *Profesor* adalah pakar di bidang ilmu tertentu. kepadanya diberikan kehormatan akademik sekaligus tunjangan finansial yang cukup memadai. Namun, menjadi *profesor* bukanlah tujuan akhir. Gelar *profesor* hanyalah bentuk pengakuan dan penghormatan, sementara esensinya adalah bahwa seorang *profesor* adalah mereka yang punya dedikasi tinggi terhadap

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama.

Sebagai kata akhir, masyarakat pada umumnya berharap seorang *profesor*, sejatinya adalah yang bukan hanya mempunyai kepakaran terhadap bidang ilmu tertentu, tapi juga memiliki integritas, dedikasi, dan menjalankan nilai-nilai agama dalam setiap langkahnya. Satu hal yang sangat penting untuk dicatat bahwa seorang *profesor* tidak akan pernah berhenti untuk selalu produktif dalam penelitian ilmiah dan publikasi jurnal internasional. Pada akhirnya nanti, fungsi dan peran seorang *profesor* akan mengangkat martabat bangsa dan negara dalam komunitas akademik internasional. Itulah *profesor* mulia, *profesor* masa depan. Semoga (...).

POTRET DOSEN DI INDONESIA DAN MALAYSIA: mengapa kinerja mereka jauh lebih baik ?

Oleh : Jaja Suteja

Menurut UU Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 Pasal 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu yang dimaksud dengan **Guru besar** yang selanjutnya disebut **profesor** adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Selanjutnya pada pasal 53 dan 56 Pemerintah memberikan tunjangan Dosen dan Tunjangan Kehormatan Professor yang diangkat oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan Tinggi.

Manakala kita lihat konstruksi UU Guru dan Dosen tersebut saya kira sudah jelas bahwa Dosen memiliki kewajiban sesuai dengan tridharma Perguruan Tinggi,

sehingga melekat padanya tugas yang harusnya dijalankan sesuai dengan amanah tersebut. UU tersebut wajar dan Normatif, siapapun yang menyandang profesi tersebut (dosen/guru besar) terikat oleh tugas dan kewajiban untuk melakukan proses pendidikan dan pengajaran, mengerjakan sejumlah riset sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dan sebagai bagian dari warga masyarakat, maka sudah selayaknya dan seharusnya mereka juga melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan agar mampu menyebarkan ilmu pengetahuan serta beragam temuan menarik dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata implementasi tugas dosen termasuk didalamnya Guru Besar belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh UU tersebut.

Kinerja atau produktivitas dosen yang masih rendah tersebut, tentu ada banyak sekali faktor yang mempengaruhinya mengapa kondisi tersebut bisa terjadi di negara kita?. Seandainya persentase jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala disatukan, data per-akhir desember 2015 jumlahnya tidak kurang dari 34.500 dosen atau sekitar 18% dari

jumlah total dosen yang ada, baik di PTN maupun di PTS. Manakala merujuk kepada pasal 4 ayat 1 huruf (a) dan (b) Permendikbud No. 78 tahun 2013 yang kemudian diperbaharui lagi oleh Permenristek Dikti No. 20 tahun 2017 secara jelas disampaikan dalam pasal 4 sebagai berikut: Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan (i) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau (ii) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental atau desain monumental. Sementara itu bagi Guru Besar dijelaskan dalam pasal 8 huruf (g) disebutkan bahwa, seorang professor seharusnya: (i) menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau (ii) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental atau desain monumental dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Portal kinerja dosen merujuk pada pasal 4 dan 8 baik di Permendikbud 78 maupun permenristek dikti No. 20 tahun 2017 masih dalam

taraf yang wajar dan minimum, mengapa demikian ? Coba kita bandingkan bagaimana kriteria untuk menjadi Professor di Malaysia, untuk menjadi Guru Besar di Malaysia, seorang Dosen atau mereka menyebutnya **Pensyarah** harus menerbitkan 30 (tiga puluh) tulisan di jurnal yang lolos dari tim *peer review* serta telah meluluskan tidak kurang dari tiga mahasiswa Doktor (S3). Belajar dari Malaysia, maka syarat minimum lektor kepala dan professor di Indonesia sebenarnya masih jauh dibawah standar negara negara lain di kawasan ASEAN.

Lambatnya pergerakan produktivitas dosen di Indonesia, sudah mengarah pada lemahnya budaya akademik, apabila civitas akademika menyadari betul bahwa melakukan riset adalah sebuah kebutuhan, seperti halnya bagaimana kita lapar, maka jawabannya harus makan, maka rasanya tidak sulit mengejar jumlah riset dan publikasi ilmiah baik nasional, regional maupun Internasional. bayangkan apabila 34.500 dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar selama 3 tahun melakukan riset, maka tidak akan kurang karya publikasi di data peng-*indexed* jurnal bereputasi seperti di **Shcimago Journal Rank (SJR), Thomson Reuters** maupun

DOAJ. Sehingga seharusnya selama tiga tahun ada sebanyak 11.500 jurnal yang dimuat diberbagai operator jurnal bereputasi dengan memiliki *impact factor*. Seandainya dari jumlah tersebut diambil interval (*lower dan upper limit published journal*), antara 30% s.d. 60%, maka harusnya tersedia sebanyak 3.450 s.d. 6.900 *published journal*. Angka ini sebenarnya masih jauh dibawah progress dari dosen-dosen di negara negara sahabat di ASEAN, dimana mereka mengklaim bahwa dosen mampu menghasilkan artikel yang dimuat di jurnal internasional rata rata 1 s.d. 5 jurnal/tahunnya, sehingga tidaklah berlebihan apabila Seorang Professor di Malaysia mampu menghasilkan 30 jurnal dalam karirnya.

Merujuk data yang bersumber pada SJR (*Scimago Journal Rank*) pada tahun 2016, maka Indonesia hanya memiliki **total published articles** sebanyak 39.719 artikel, Thailand memiliki 123.410, Malaysia 181.251 dan Singapura memiliki 215.553 artikel. Jumlah publikasi kita hanya unggul sedikit dari Vietnam 29.238. Produktivitas akademisi kita hanya 18.43% dari Singapura, atau hanya 21.91% dari Malaysia dan 32.19% dari Thailand. Jadi Indonesai

harus menunggu 20 tahun apabila ingin mengejar produktivitas dosen-dosen di Malaysia. Sehingga tidaklah berlebihan apabila kemententerian Riset dan pendidikan tinggi berencana mengevaluasi pemberian tunjangan dosen dan insentif kehormatan guru besar, yang akan dilakukan pada akhir November 2017 dengan memperhitungkan karya ilmiah sejak tahun 2015. sehingga pada tahun 2018, tunjangan bisa dihentikan atau dipotong, sama sekali (Dirjen sumberdaya Iptek dan Dikti Kemenristek dan Dikti Republik Indonesia).

Meskipun demikian, perbedaan kinerja dosen tersebut haruslah disikapi secara arif dan bijaksana, tentu seharusnya ada opsi atau kebijakan lain yang lebih elegan, bagaimanapun kondisi Malaysia, Singapura dan lainnya berbeda dengan di Indonesia, sebut saja masalah faktor pendukung, misalnya ketersediaan perpustakaan bagi dosen dan mahasiswa; ruang-ruang diskusi publik; perkantoran atau ruang kerja dosen dan standar Gaji seorang Dosen, serta berbagai insentif/*grant* yang dapat diterima bagi dosen untuk melakukan sebuah riset yang unggul. Apabila melihat perbandingan fasilitas pendukung yang diperoleh antara dosen di Indonesia

tentu saja jauh berbeda, bisa jadi faktor-faktor ini luput dari pertimbangan para Pembesar di Kemenristek Dikti.

Potret Dosen Di Malaysia

Sebagai perbandingan seorang dosen di Malaysia, sebut saja di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) mendapatkan *grant* penelitian tiga sampai empat kali setiap tahunnya. Paling sedikit 45 juta rupiah dan sekitar 150 juta rupiah setiap *grant*. Grant itu digunakan untuk proses penelitian dan mengikuti konferensi di berbagai belahan dunia tanpa takut kehabisan dana. Maka, seorang dosen di Malaysia dalam setahun bisa bepergian untuk melakukan seminar di berbagai negara di Asia Timur, Eropa atau sesekali di Indonesia. Kegiatan seminar di Luar negeri dan menulis di jurnal internasional bagi dosen di Indonesia masih merupakan barang yang mahal.

Di negeri Malaysia Perolehan dana riset yang berasal dari **MOSTI** (Kementerian Riset dan Teknologi-nya Malaysia) dilakukan melalui jalur kompetisi nasional. Prosesnya sederhana dan cepat. Dapat dikatakan tidak ada dosen *level senior lecturer* ke atas yang tak

punya dana riset memadai. Untuk mendapat dana riset 200.000-an ringgit (Rp 500 s.d. Rp 600 juta) per topik riset tidaklah sulit. Di Malaysia juga dimungkinkan jalur S-2 dan S-3 "**by research**". Dapat dikatakan semua universitas menerima mahasiswa S-2 dan S-3 walau baru berdiri. Dengan sistem ini, dimungkinkan penerimaan mahasiswa S-2 dan S-3 kendati jumlah mahasiswanya hanya 1-2 orang. Asal ada pembimbing berkualifikasi memadai dapat dimulai studi S-2 dan S-3. Dengan sistem ini, dapat dikatakan semua dosen bergelar doktor bisa punya mahasiswa S-2 dan S-3 untuk dibimbing, elemen amat penting dalam pelaksanaan riset.

Dalam hal LPPT (Laporan Penilaian Prestasi Tahunan), sejumlah universitas di Malaysia membagi dua kriteria besar dosen, golongan pertama dosen yang berbasiskan pengajaran, dimana beban tugas mengajarnya lebih besar; dan golongan kedua adalah berbasiskan riset. Universitas di Malaysia karena otonominya menerapkan persentase yang berbeda bobot penilaian kinerja antara dosen yang memilih dominan mengajar atau peneliti ini. Ada yang menerapkan bobot 70:30, maksudnya 70% beban kerja memberikan kuliah dan 30% melakukan riset

untuk dosen berbasiskan pengajaran; dan partnernya adalah sebaliknya 30:70, yaitu 30% beban kerja sebagai pengajar dan 70% lainnya sebagai periset.

Masih di Malaysia, untuk menunjang kelangsungan riset, bilamana sumber daya dosen lokal yang ada belum memadai, terbuka luas kesempatan mengundang dosen asing bergelar doktor untuk mengajar sekaligus jadi peneliti. Setiap universitas punya otoritas untuk menetapkan jabatan akademik, tak harus mengurus ke "Dikti"-nya mereka secara sentral seperti di Indonesia. Proses penetapannya juga terbilang cepat, utamanya melihat kinerja riset. Universitas juga punya otoritas menetapkan standar gaji dan fasilitas. Tidak heran jika banyak dosen **bergelar doktor** dari Indonesia menjadi "TKI" di sana. Kehadiran dosen asing yang mumpuni ini jadi faktor penting pendongkrak kinerja riset Malaysia. Hal ini mestinya perlu ditelusuri penyebabnya. Boleh jadi ini penyebab utama rendahnya publikasi Indonesia. Patut diduga, iklim riset yang kurang kondusif menyebabkan peneliti Indonesia jadi "mandul" sepulang ke Indonesia. Bukan rahasia lagi, banyak peneliti hebat kita yang baru pulang studi lanjut di luar negeri kembali ke kampus tak punya meja, apalagi

fasilitas dan dana riset, Belum lagi beberapa kebijakan Dikti yang bertentangan dengan semangat menaikkan jumlah publikasi Indonesia. Di antaranya apa yang dinamakan "batas kepatutan" dalam melaksanakan penelitian yang dinyatakan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen

Bagaimana dengan Di Indonesia

Sebenarnya bukanlah maksud mengeluh karena gaji atau insentif yang rendah, tapi beginilah potret dosen di Indonesia. seorang dosen peneliti di Indonesia harus haruslah betul-betul membanting tulang untuk sekedar hidup layak sebagai seorang dosen. apakah mereka hidup Berlebihan? walaupun relatif dan tidak menutup kemungkinan ada, tapi rasanya jumlah jauh lebih sedikit dari kondisi pertama. Sebagai ilustrasi seorang dosen junior bergelar master (MS.c) hanya memiliki pendapatan berkisar empat juta rupiah per bulannya. Dosen senior bergelar Doktor hanya bisa membawa pulang uang sekitar Rp. 5 s.d. 7 juta rupiah setiap bulannya. Jika sudah disertifikasi mungkin bisa mendapatkan tujuh sampai sembilan juta rupiah. Proses sertifikasi berlangsung amat sangat lambat dan berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)

alias urut kacang. Keamanan finansial rasanya baru bisa didapatkan jika sudah mendapatkan jabatan fungsional Professor, yaitu sekitar Rp. 13 s.d. Rp. 15.juta rupiah per bulannya. Itupun pembayarannya dilaporkan berlangsung tersendat-sendat.

sehingga sudah menjadi amat lajim manakala dosen mengasong atau mengamen ngajar disetiap PT, dan hal ini masih menjadi hal yang lazim di Indonesia, di kampus manapun. Amat biasa seorang dosen mengajar di dua, tiga atau empat universitas. ketika itu, mana waktu tersedia untuk melakukan riset, rasanya sulit untuk mengendalkan mereka untuk bisa menghasilkan karya-karya ilmiah produktif inovatif yang bisa didesiminasikan pada komunitas akademik internasional. Dana-dana penelitian memang mulai digulirkan oleh Dirjen Dikti. Namun banyak persoalan teknis yang masih menghantui terutama dalam penyelenggaraannya di berbagai perguruan tinggi. Di kampus tertentu ada Pemotongan dana penelitian oleh oknum tertentu secara semena-mena dan tidak senonoh dilaporkan terjadi. Jumlahnya juga masih jauh untuk bisa bersaing dengan kolega-kolega di Malaysia.

Simpulan

Tanpa hatus menyalahkan siapa siapa dan institusi pemerintah yang mana, maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa merubah kondisi ini, secara bersama-sama ada syarat untuk kita bisa melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yaitu Kerja. kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tegas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Manakala kita ingin merubah kondisi kinerja civitas akademika (Dosen dan mahasiswa) maka bagaimana kita secara bersama-sama berkeinginan untuk membangun budaya akademik (*academic culture*), mungkin ada *shock culture* yang dilewati, tapi itu adalah sebuah proses. misalnya budaya menulis, budaya bicara/berdiskusi, budaya belajar, ini yang diyakini dalam jangka panjang bisa menjadi satu re-solusi jangka panjang untuk mengurangi besarnya gap kinerja akademik kita dengan beberapa negara ASEAN. Bukan berarti memberikan insentif/*reward* tidak penting, atau bahkan mencabut/menunda pembayaran insentif Dosen dan Guru Besar sebagai *punishment* atas rendahnya kinerja juga tidak penting, tapi langkah seperti itu hanya sebagai obat jangka pendek, sementara akar permasalahannya tidaklah terobati.

Harus diakui fondasi bangunan riset kita masih rapuh, berakibat pada rendahnya publikasi kita. Jalan pintas instruksi Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti perlu dibarengi dengan upaya serius pembangunan fondasi riset yang lebih kokoh agar keberhasilannya bersifat berkelanjutan., semoga***

MASA DEPAN RISET DALAM POLITIK ANGGARAN

Oleh : Jaja Suteja

Pada era-revolusi digital saat ini, setiap Perguruan Tinggi (PT) sedang berkompetisi dalam memaksimalkan implementasi Tri-Darma Perguruan Tinggi seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45, bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa. Selanjutnya menurut Pasal 1 PERMENRISTEK-DIKTI Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Masalah Penelitian Dosen

Persoalan mendasar lainnya adalah terkait rendahnya kinerja penelitian yang ada dan terbatasnya alokasi pendanaan untuk penelitian. Indonesia merupakan negara dengan investasi terendah dalam bidang penelitian. Alokasi anggaran penelitian hanya berkisar 0,09% dari PDB APBN, sangat rendah jika dibandingkan dengan negara berpenghasilan menengah lain seperti Malaysia dengan investasi sebesar 0,6%, Thailand 0,26%, dan China 1,47%.

Terkait dengan kewajiban dosen untuk melakukan penelitian dan selanjutnya dosen juga punya kewajiban tambahan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal-jurnal relevan baik

Dari UNPAS Untuk Kebaikan Peradaban

nasional, internasional atau bahkan jurnal internasional bereputasi menjadi permasalahan tersendiri, ketersediaan jurnal-jurnal bereputasi dan berkualitas yang ada tidak sebanding dengan jumlah dosen yang memiliki NIDN yang tercatat di PD-DIKTI saat ini. Dalam Pangkalalan Data tercatat kurang lebih ada 274.456 dosen baik di PTN maupun PTS (PDPT:2017), dimana jumlah tersebut masih didominasi oleh dosen tanpa jabatan fungsional sebesar 37,32% disusul lektor sebesar 22,90%, selanjutnya asisten ahli sebesar 20,85%. Sementara itu dosen dengan jabatan lektor kepala dan guru besar masing masing sebesar 16.25% dan 2,67%. Dari ke-4 level jabatan fungsional tersebut, maka lektor kepala dan guru besar merupakan jabatan yang memiliki potensi yang sangat besar untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya, namun demikian akses dan ketersediaan jurnal menyebabkan banyak dosen yang harus masuk dalam daftar antrian publikasi jurnal bereputasi tersebut.

Semangat untuk melakukan penelitian sekaligus mempublikasikan hasil karya ilmiah dosen terus ditingkatkan, mimpi Kemenristek Dikti untuk melampaui publikasi dan sitasi dokumen dengan

negara jiran terus dipacu bahkan harapan bisa *leading* tingkat ASEAN terus digelorakan. Berbagai aturan dibuat, dalam Permenristek Dikti No. 20 Tahun 2017 tentang Pembinaan Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor terutama pasal 4 dan 8 menyatakan bahwa Lektor kepala Harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten atau karya seni monumental/desain monumental dalam waktu 3 (tiga) tahun. sementara pasal 8 berbunyi, seorang profesor harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental.

Penelitian dan Keterbatasan Anggaran

Semangat meneliti para dosen di PT, terlepas apakah karena terpaksa, dipaksa atau sudah menjadi biasa dan bahkan menjadi sebuah budaya, pada saat ini para peneliti harus sedikit mengerutkan kening, betapa tidak anggaran yang sudah dijanjikan pemerintah dalam APBN dan APBD nilainya ditinjau

kembali, Pemerintah kembali melakukan pemotongan belanja barang kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 16 triliun dari rencana semula Rp 237,098 triliun menjadi Rp 221,098 triliun. Terdapat 4 (empat) kementerian yang jumlah anggarannya terkena kebijakan pemangkasan, termasuk salah satunya adalah Kemenristek Dikti. Keputusan itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) 4/2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, secara khusus kantor Kemenristekdikti anggarannya dikurangi dari semula Rp 10,942 triliun menjadi Rp 9,462 triliun (Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi kena pemotongan sebesar Rp 1,953 triliun (dari pagu APBN 2016 Rp 40,627 triliun).

Terlepas dari maksud dan tujuan kebijakan pemotongan anggaran ini dimana pemerintah berargumentasi bahwa dengan pemangkasan ini, pemerintah mengklaim dapat menghemat hingga **triliunan rupiah**. Menurut kantor kementerian keuangan yang dipangkas adalah anggaran belanja kementerian dan lembaga yang dinilai **tidak efisien**, seperti anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat

kerja, serta barang dan jasa yang dinilai tidak memiliki **dampak ekonomi berlipat**. Alasan kementerian keuangan menyebutkan bahwa beban anggaran ini nantinya akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. **Pertanyaan selanjutnya**, apakah **pos anggaran** untuk **penelitian** masuk pada kategori **tidak efisien** dan **tidak memiliki dampak ekonomi berlipat?**, sehingga apakah Penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dosen di lingkungan kemenristek-dikti pada multi-disiplin ilmu tidak memiliki **multiplicier-effects** pada pertumbuhan ekonomi?. Apabila alasan ini benar-benar muncul dari Tim Kementerian (ekonomi-keuangan) Kabinet Kerja Jokowi tentu kebijakan ini telah mencedrai pernyataannya sendiri bagaimana **nawacita bidang pendidikan** yang telah menjadi jargon dalam masa masa awal pemerintahan serta RENSTRA Kemenristek Dikti yang bermimpi mampu *leading* dalam riset dan publikasi tingkat ASEAN.

Bagi masyarakat awam tentu kondisi tersebut memunculkan pertanyaan sederhana, apakah pemerintah gagal memenuhi target pendapatan pada tahun 2017?, atau apakah target pajak tidak tercapai?, tentu terlalu dini seandainya

kita berkonklusi bahwa target pajak tidak tercapai bahkan dianggap gagal, sehingga sangat dibutuhkan penghematan dan harus melakukan pemotongan anggaran. Bagaimanapun, *action plan* yang ditempuh dengan melakukan pemangkasan anggaran ditengah jalan mencerminkan perencanaan yang kurang matang, kalau di dalam belanja barang, mungkin patut untuk dipertimbangkan proporsinya. Namun demikian yang perlu diingat seharusnya besaran nilainya disusun pada saat perencanaan. Kenapa kemudian perencanaan sudah mulai terealisasi, baru di tengah-tengah kegiatan harus ditinjau ulang karena tidak tersedianya pendanaan?.

Sebagai contoh bidang Penelitian, pada kluster riset binaan dan madya boleh jadi tidak mengalami pemotongan anggaran, namun sejumlah skim yang diusulkan dalam kelompok/kluster Utama dan Mandiri mengalami pemotongan anggaran termasuk ketersediaan biayasiswa pascasarjana. Tentu saja kondisi demikian sangat tidak mendukung terhadap keinginan awal pemerintah, khususnya mengenai rencana kemenristek dikti untuk mendorong menjamurnya penelitian pada setiap institusi pendidikan tinggi. Satu sisi peneliti didorong,

bahkan dipaksa harus meneliti dengan sedikit ancaman peninjauan kembali pembayaran sertifikasi dosen dan insentif kehormatan guru besar, namun pada sisi lain ketersediaan fasilitas penunjang seperti jurnal, kemudahan pengurusan jabatan fungsional masih terkendala dengan birokrasi, minimal pada tingkat administrasi awal (pengurusan jabatan fungsional dosen PTS masih sangat panjang alur birokrasinya). Apakah karena masalah ketidakmampuan menyusun anggaran, atau karena kepentingan sekelompok tertentu yang memiliki akses terhadap penyusunan anggaran atau karena ketidakmampuan meng-*estimate cash-in-flow* harus dibayar dengan **tertunda** atau **dibatalkannya** sejumlah penelitian bahkan bagi **peneliti muda** (dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, yang sering diplesetkan sebagai *tentara pelajar*) akan layu sebelum berkembang?.

Simpulan

Penelitian adalah mata airnya ilmu pengetahuan, ia memiliki dampak yang luas terhadap pelaksanaan darma pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, tertundanya atau tersendatnya penelitian akan berdampak signifikan terhadap aspek kehidupan

lainnya, paling tidak dalam aspek kreativitas, inovasi. Sehingga bagaimanapun, penelitian harus tetap dilakukan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi kekurangan pendanaan atau adanya peninjauan kembali sejumlah pos anggaran, sehingga penelitian tidak menjadi korban dari masalah politik anggaran.

Permasalahan tidak tercapainya target pendapatan pemerintah adalah hal biasa, tentu selalu ada jalan keluarnya. Tingkat kebocoran anggaran, masih banyaknya pengusaha dan orang kaya Indonesia yang memarkir dananya di sejumlah bank di luar negeri, banyak pengusaha/perusahaan asing mengeskplorasi sumberdaya dan tidak bayar pajak masih dibiarkan saja tanpa ada tindak lanjut secara hukum. Jadi alangkah tidak bijaknya, seandainya alibi kekurangan atau alasan efisiensi yang menjadi target sasaran pemangkasan anggaran adalah **bidang penelitian**, semoga pemerintah memahami bagaimana besarnya harapan peneliti untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui karya kreatif- inovatif risetnya, tentu mereka akan merasa sangat sedih dan kecewa.

MENAKAR WACANA IMPOR REKTOR

Oleh : Jaja Suteja

Rencana pemerintah mendatangkan Dosen luar negeri untuk menjadi calon Rektor Universitas (PT) baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS) di Indonesia terus menimbulkan gelombang pro dan kontra. Gagasan impor Rektor itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja universitas, terutama bidang penelitian yang masih rendah. Asumsinya, kualitas Rektor berpengaruh signifikan terhadap kemajuan suatu universitas, khususnya penelitian. Apakah Rektor dari dosen luar negeri yang kompeten akan menjadi jaminan kinerja universitas di Indonesia menjadi lebih baik lagi? Melihat wacana rencana impor Rektor untuk mengelola universitas di Indonesia dalam konstelasi globalisasi dan rencana internasionalisasi serta kinerja riset bertaraf global sah-sah saja, tetapi barangkali rencana tersebut terlalu menyederhanakan persoalan sarat kepentingan dan sangat sensitif. Kinerja dan keunggulan universitas atau Perguruan Tinggi dipengaruhi oleh banyak faktor, Rektor sebagai pimpinan tertinggi salah satu diantaranya.

Berdasar pada rencana strategik Kementerian Riset dan Teknologi dan DIKTI sampai dengan tahun 2019 maka Perguruan Tinggi di Indonesia tidak hanya sebagai *Agent of Education, Agent of Research, Agent of Knowledge and Technology Transfer* dan *Agent of Economic Development* tetapi juga sebagai **Agent of Culture**. Tentu saja bagaimana logika rasionalnya sebuah institusi pendidikan yang kemudian memiliki amanah sebagai salah satu unsur atau komponen yang diharapkan mampu mempertahankan dan sekaligus meningkatkan nilai nilai luhur budaya masyarakat lokal (sebut saja universitas berbasis pendidikan, agama atau budaya kedaerahan), sementara petinggi sebagai *decision maker*-nya tidak mengenal secara utuh serta memiliki suasana kebatinan yang berbeda dan hanya bekerja sebatas profesi saja apa yang menjadi kehendak para pemangku kepentingan masyarakat atau komunitasnya, tentu ini kemudian akan menjadi satu persoalan tersendiri. Meskipun demikian barangkali mereka dapat berargumentasi bahwa konsep budaya, bisa jadi tidak berdasar darah atau keturunan akan tetapi berdasar kecintaan dan atau komitmen tertentu saja.

Kriteria Rektor

Apabila kita inventarisasi maka sebenarnya kita tidak kekurangan stok dosen yang kompeten. Data dari forlap dikti 2015, kita memiliki 230.633 orang dosen, diantaranya banyak dosen yang memiliki prestasi dalam bidang akademik, memiliki kreatifitas, inovatif, bereputasi internasional, berintegritas dan keluaran universitas terbaik dalam maupun luar negeri. Mungkin berikut ini bisa jadi sebuah pengalaman empiris dalam mengelola institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang memiliki keunikan atau permasalahan spesifik serta segudang permasalahan yang memiliki urgensi untuk segera dilakukan pembenahan secara serius, baik itu terkait permasalahan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, sebelum kebijakan impor Rektor benar-benar direalisasikan oleh pemerintah.

Dalam banyak jabatan publik tertentu, sudah lajim bagi seseorang untuk dapat menduduki jabatan tertentu sebelumnya harus memenuhi persyaratan minimum dan lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tidak terkecuali bagi jabatan

Rektor sebuah perguruan tinggi. Apalagi ia adalah sosok yang selain harus memiliki profesionalisme dan kecakapan manajerial juga harus menjadi sosok panutan dan memiliki derajat etika yang luhur. Kriteria kompeten bagi Rektor berbeda dengan kriteria kompeten seorang dosen yang ilmuwan. Seorang ilmuwan yang menghasilkan banyak karya ilmiah di jurnal internasional, menjadi pembicara di banyak seminar internasional, dan karenanya menjadi begitu terkenal seperti seorang selebritis, sosok tersebut belum tentu cocok sebagai Rektor universitas. Dosen teladan atau terbaik universitas bisa terpilih menjadi Rektor, bisa juga tidak. Banyak dosen dalam aktivitas kesehariannya menjadi bagian dari komunitas tertentu, yang tidak hanya sebagai komunitas akademik di kampusnya saja. Masalah sesungguhnya bukan pada terkotak-kotaknya dosen kedalam organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, HMI, atau berafiliasi pada organisasi almamaternya (IKA), atau bahkan komunitas kesukuan/kedaerah atau Paguyuban tertentu. Tetapi, bagaimana mereka bisa sepakat memilih **Rektor kompeten** yang dianggap mampu membawa kampus produktif serta melahirkan karya-karya inovatif dan diakui di dunia internasional,

memang akan jauh lebih baik lagi kalau ia juga sekaligus sebagai contoh ideal dari apa yang ia sampaikan (*leadership by example*). Sehingga berkata melalui perbuatan (*actions*) akan jauh lebih efektif ketimbang berbuat melalui kata kata. Pemilihan Rektor dengan kriteria kreatif, inovatif, serta berintegritas inilah yang seharusnya dilakukan dosen universitas di Indonesia, dari kelompok manapun, yang mampu membangun atmosfir akademik (*academic atmosphere*) di kampusnya masing masing.

Problema SDM PT di Indonesia

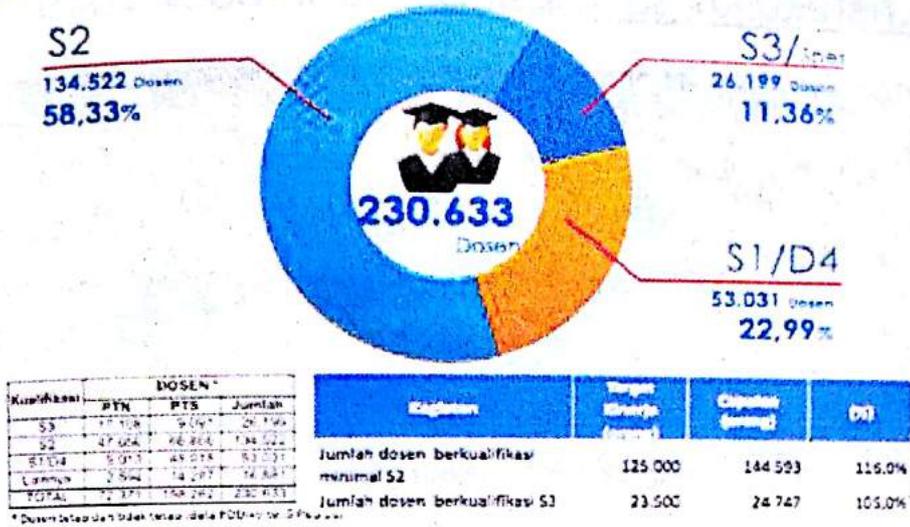
Berikut adalah permasalahan yang sangat penting untuk segera dicari solusinya oleh para pengambil keputusan di negara ini (kemenristek dan dikti) termasuk para Rektor di perguruan tinggi masing masing, diantaranya terkait masalah:

- a) Masih banyak dosen yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal (masih berpendidikan S1).
- b) Jumlah dosen yang berpendidikan doktor (S3) masih kurang.

- c) Masih banyak dosen yang belum memiliki jabatan akademik.
- d) Jumlah Guru Besar masih sangat sedikit .
- e) Publikasi ilmiah dosen/ilmuwan dan HAKI masih sangat terbatas dan
- f) Nisbah dosen mahasiswa dan sarana pra sarana banyak yang masih belum ideal.

Pada peraga berikut ini dapat dilihat profil kualifikasi dosen di Indonesia pada tahun 2015, tampak bahwa jumlah dosen kita sebanyak 230.633 orang dengan kualifikasi Doktor sebesar 11.36% atau sebanyak 26.199 dosen, dan masih terdapat dosen dengan pendidikan S1/D4 sebanyak 22.99% atau 53.031 orang dosen, jumlah tersebut masih menjadi masalah ketika dikaitkan dengan aturan bahwa Dosen harus minimal berpendidikan S2 (magister).

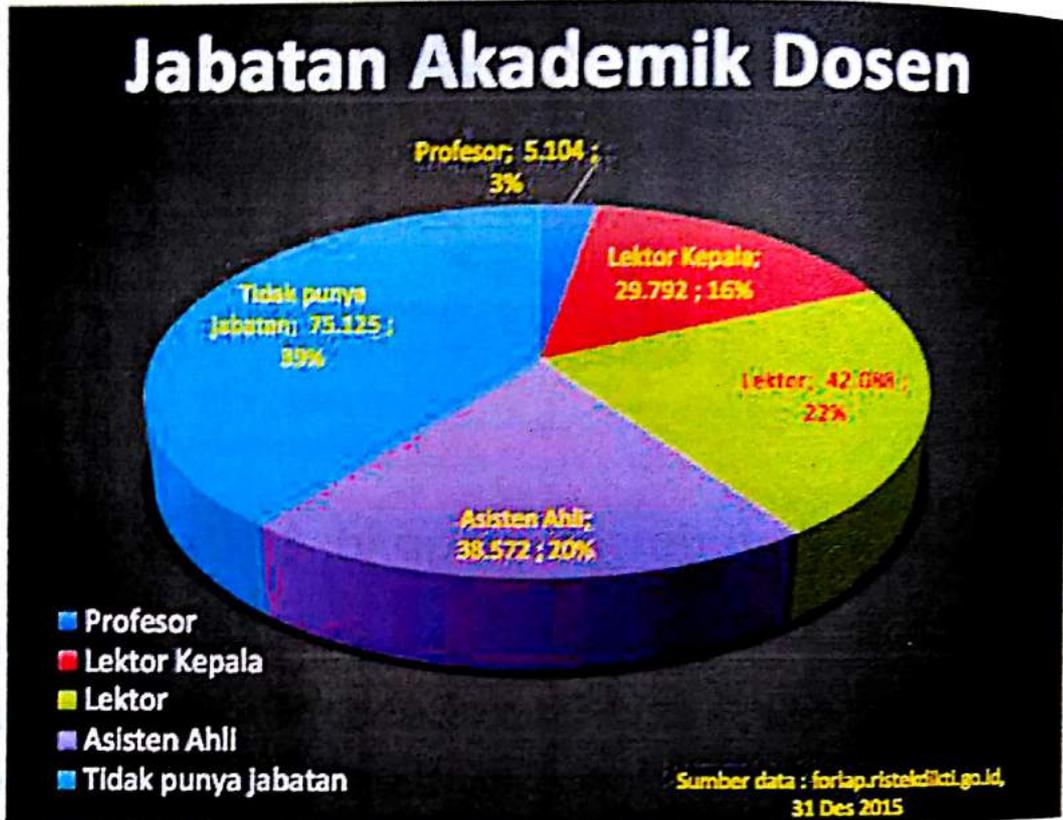
PROFIL KUALIFIKASI DOSEN



sumber: forlap.ristekdikti.go.id, 31 Des 2015

Sementara itu dari 230.633 dosen yang ada, kita hanya memiliki 3% saja Guru Besar (Professor) atau sebanyak 5.104 GB dan 39% diantara dosen-dosen tersebut bahkan tidak memiliki jabatan fungsional atau sebanyak 75.125 orang dosen. Dua kondisi ekstrim tersebut eskalasinya meningkat menjadi permasalahan serius yang harus segera diselesaikan baik oleh kementerian maupun melalui berbagai kebijakan Rektor perguruan tinggi, bahkan empat tahun kedepan diproyeksikan sekitar 20% Guru Besar yang ada akan memasuki masa pensiun (Professor emeritus). Berikut ini secara detail komposisi jabatan

fungsiional dosen berdasarkan sumber
forlap.ristekdikti.go.id per 31 Desember 2015.



sumber: forlap.ristekdikti.go.id

Kemampuan Meneliti

Mengundang dosen luar negeri menjadi Rektor universitas baik negeri maupun swasta di Indonesia tidak otomatis akan meningkatkan reputasi universitas di level internasional. Karena kendalanya adalah lemahnya kemampuan meneliti dan menulis dosen. Publikasi ilmiah universitas baik negeri maupun swasta yang relatif masih rendah bukan

semata 'masalah' rektor, tetapi lemahnya kompetensi meneliti para dosen. Peluang penelitian bagi para dosen sudah terbuka lebar, baik di Kemenristek dan Dikti, di Kementrian Agama (Kemenag), maupun di kampus masing-masing. Dananya cukup besar meskipun masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan rasio jumlah dosen, apalagi dengan dana riset negara-negara berkembang lain. Banyak dosen memperoleh dana penelitian, dari jumlah sebesar Rp.10 juta hingga mencapai Rp. 200 juta, atau bahkan lebih, tetapi hasil penelitiannya tidak menghasilkan sesuatu yang baru sehingga tidak 'dibaca' ilmuwan dunia. Penelitian mereka hanya berakhir di jurnal atau di lemari perpustakaan atau berakhir hanya sebagai persyaratan kenaikan jabatan fungsional saja. Bahkan suatu salah satu perguruan tinggi di Koperts Jawa Barat Banten (Universitas Pasundan), telah berani menstimulus dosen-dosennya untuk menulis di Jurnal Bereputasi Internasional dengan memberi insentif sebesar US \$ 1,300 bahkan dinaikkan lagi menjadi US \$ 1,500 untuk setiap satu tulisannya yang dipublish di jurnal terindeks Scopus atau Thompson.

Kemampuan menulis para dosennya dilingkungan PT di Indonesia memang masih ada dibawah kinerja

QUO VADIS RISET KITA ?

Oleh : Jaja Suteja

Pemerintah dan Lembaga Pendidikan Tinggi tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kinerja penelitian nasional. Apabila kita simak data dari Bank Dunia (2016) tentang proporsi dana penelitian Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB), hanya sebesar 0,09% naik hanya 0.01% dari tahun 2015 (0.08%). Perlu diketahui bahwa 84% dari angka 0,09% itu disumbangkan dari APBN, padahal di negara maju riset selalu didukung dunia industri. Di negara-negara maju, angkanya sudah melebihi rata-rata 1,5%, termasuk singapura sebesar 2%. Bahkan diantara Negara Negara ASEAN, Indonesia masih jauh tertinggal, Thailand saja sudah mendekati 0.61% sedangkan malaysia sudah mencapai 0.91% dari PDB-nya. Proporsi yang sangat kecil terhadap PDB menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat industri masih sangat kecil dalam memajukan riset nasional. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah peneliti Indonesia juga masih dibawah rata rata. Peneliti Indonesia yang terdata sekitar 250 orang dari 1 juta penduduk, yang berarti jumlah peneliti tersebut tentu

saja terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mendekati 240 juta jiwa atau kurang lebih 60.000 peneliti yang tercatat. Jumlah peneliti Indonesia yang terdaftar di LIPI ada 8 ribu orang dan 16 ribu peneliti bekerja di perguruan tinggi, sementara peneliti lainnya tersebar dan berada di bawah naungan institusi swasta. Bahkan di dunia pendidikan tinggi sendiri hanya 6.67% saja dosen yang ada sebagai dosen peneliti, sisanya teramat besar berperan sebagai dosen pengajar.

Mengutip pendapat Cahyono (2016) yang mengatakan bahwa pada umumnya negara-negara maju sudah melakukan tata-kelola risetnya dengan baik, setiap kali membuka peluang hibah riset, pemerintahnya selalu mewajibkan kalangan industri untuk menyediakan dananya minimal 10% s.d.15% dari dana riset yang diajukan oleh universitas, *skema ini cukup langka kita temui di tanah air*. Industri kita memang banyak menjalin kerjasama dengan kampus-kampus ternama. namun dalam bentuk proyek konsultasi, dimana dosen menerima sejumlah honor sebagai imbal jasa tenaga ahli. Bisa dipastikan, publikasi ilmiah tidak menjadi prasyarat dari model kerjasama jangka pendek semacam ini.

Alih alih industri menyediakan dana risetnya yang lebih besar serta jalinan yang strategis dengan lembaga lembaga riset mandiri dan ramai-ramai banyak Perusahaan termasuk BUMN mendirikan Perguruan Tinggi sebagai bagian dari *holding*-nya, tentu kondisi seperti ini tidaklah menguntungkan apabila dikaitkan dengan rencana hilirisasi dan tujuan riset secara nasional, **MENGAPA ?** seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa sampai dengan saat ini komposisi biaya riset masih berkontribusi secara signifikan dari APBN, sementara kondisi seharusnya adalah dari industri, dalam hal ini adalah Perusahaan baik milik pemerintah (BUMN) maupun milik swasta (BUMS).

Kebijakan Hilirisasi Penelitian

PARADIGMA kinerja perguruan tinggi (PT) saat ini telah mengalami pergeseran dari pola pikir *manajemen klasik* ke *manajemen berbasis pengetahuan*. Paradigma klasik yang diperankan *saat itu* menyebabkan *kebanyakan dosen* di Perguruan Tinggi sehari-sehari **terjebak** hanya *mengajar di ruang kelas* dengan materi yang tidak pernah diperbaharui, tidak ada bukti dua dharma lain diselenggarakan dengan baik, akibatnya *transfer*

pengetahuan tidak mampu memperbaiki mutu pendidikan. Karena riset adalah mata air pengetahuan, jadi bayangkan kalau seorang dosen dalam karirnya tidak pernah melakukan riset, Sedangkan, pelajaran yang diajarkan dikatakan bermateri baru apabila dilakukan riset pada bidang keilmuannya itu.

Mengantisipasi hal tersebut, pada saat ini sudah terjadi perubahan *mind set* akademik di Perguruan Tinggi, dimana sebelumnya pelaksanaan tri-dharma PT bertumpu pada proses, pada saat ini pelaksanaan akademik sudah berorientasi atau berbasis pada luaran (*output*). Cara pandang ini terus diperbaiki, dharma terakhir harus menjadi langkah awal bagi dunia kampus untuk **menghilirisasi penelitian**. Perubahan paradigma dari berbasis proses menjadi berbasis luaran pada tri-dharma PT belum cukup untuk meningkatkan kompetensi suatu PT, tetapi dalam rangka itu perlu **menghilirisasi** penelitian, untuk mendorong tumbuhnya industri yang kuat dan memiliki daya saing yang memadai, agar produk dalam negeri menjadi tuan di rumahnya sendiri, dan mendorong perekonomian Negara dan masyarakat supaya meningkat. Selain itu, yang

terpenting adalah membaiknya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia.

Setiap riset baik yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa (dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi) bertujuan untuk mendorong aktivitas akademik menjadi lebih bermutu. Setiap orang agar mampu berkompetisi sesuai dengan kompetensinya, tidak saja hanya sebatas harus mengetahui (*to know*) tetapi mampu memahami (*do being*). Oleh karena itu, **sains** diperlukan sebagai fondasi bagi teknologi sebagaimana riset dibutuhkan untuk memperkaya kebudayaan dimana teknologi berperan dalam kesejahteraan manusia. Sains seperti matematika, fisika dan lainnya tidak dengan sendirinya dapat menghadirkan teknologi, perlu adanya kajian terus-menerus dan mendalam agar sains tidak tinggal di dalam buku-buku di perpustakaan, perlu adanya riset untuk menggali potensi-potensi yang mampu meningkatkan kehidupan manusia. Demikian juga, riset agar tidak tinggal dalam kampus dan supaya bermanfaat, haruslah **dihilirisasi** sebagai Suatu cara untuk membangun budaya riset yang memperkuat perekonomian nasional.

Menurut Mahyuddin K.M. Nasution (2016) Diperlukan kerjasama tiga parti antara *Academic, Business, dan Government* (disingkat-ABG) untuk membangun hilirisasi riset. Kampus tempat tersimpannya hasil-hasil riset dan masyarakat adalah pasar penerapan riset. Dengan demikian, diperlukan institusi yang mampu memediasi/perantara: *Bisnis* apakah itu bidang industri atau perusahaan untuk menghubungkan luaran riset dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah, yang memiliki kuasa untuk menerapkan kebijakan (hasil riset) dan memiliki wilayah kerja di mana masyarakat berada, bertindak sebagai pemegang komitmen dan pendukung setiap aktivitas. Pertalian erat antara komponen dalam *Academic, Business, dan Government* untuk mengembangkan hilirisasi riset akan melahirkan suatu daerah yang dikelola oleh tripartit secara bersama-sama. Daerah itu disebut taman sains dan teknologi (*science techno-park*, disingkat STP). Selanjutnya menurut **Teori entropi**, menyatakan bahwa secara alami segala sesuatu akan mengalami degradasi, yang muda akan tua dan hilang, yang sehat akan sakit dan mati, yang kuat akan lemah dan layu, dan atas dasar itu diperlukan suatu **usaha regenerasi** setiap bagian yang mengalami degradasi

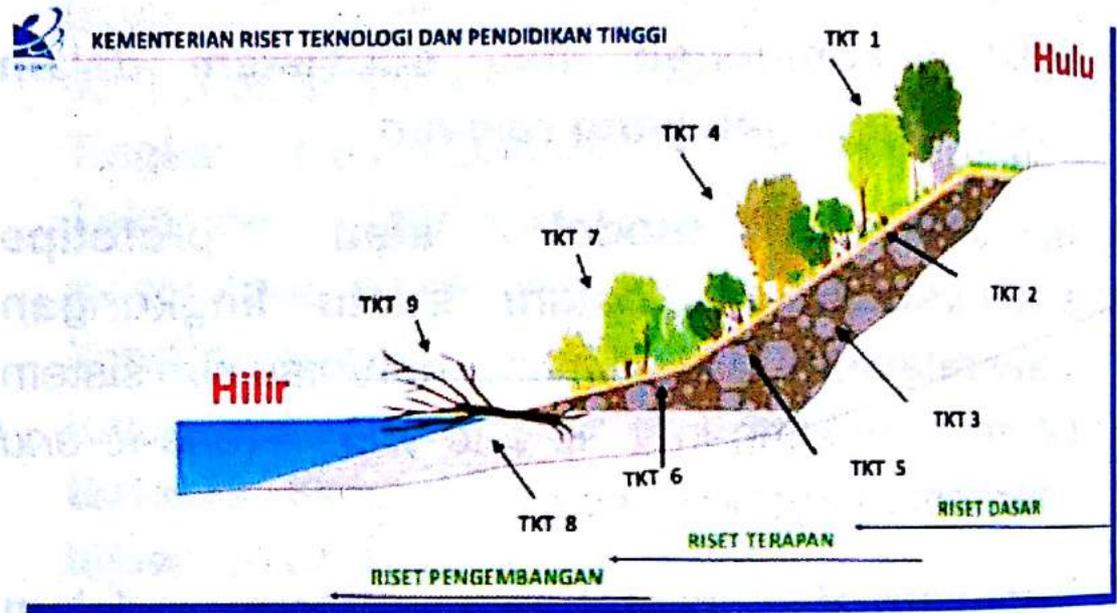
untuk melawannya dengan sifat negatif. Hal ini juga berlaku dalam dunia bisnis, dunia usaha dan masyarakat.

Terkait masalah hilirisasi riset di Indonesia tidak akan lepas dari aturan baru yaitu Permenristek dan dikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat **kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis** dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat. Dimana berdasarkan aturan tersebut, ada 9 tingkatan, yaitu:

- 1. Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan**
- 2. Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi**
- 3. Pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental**

4. **Validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium**
(contoh: lingkungan pengembangan prototipe perangkat lunak).
5. **Validasi komponen atau subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan**
6. **Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan.** Validasi modul dan/atau sub sistem dalam lingkungan "end-to-end" (*end-to-end environment*) yang relevan .
7. **Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya.** Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan operasional atau lingkungan akurasi tinggi
8. **Sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya.** Sistem secara aktual telah lengkap dan memenuhi syarat melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan operasional/aplikasi sebenarnya

9. **Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian.** Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan penggunaan operasional



Gambar : Ilustrasi mengenai Hilirisasi hasil Riset dan Pengembangan

What Scientist/Researcher Dream With What Business Need

Pada bagian ini Penulis meyakini bahwa pada umumnya periset telah memiliki agenda riset dan melaksanakannya berdasarkan kebijakan dan strategi periset sendiri, sehingga para periset sudah jauh bermimpi. Kondisi demikian akan memicu adanya

GAP atau BIAS PERSEPSI. Hal ini juga mungkin yang membuat industri enggan untuk "menaruh-uangnya" pada lembaga penelitian dan pengembangan khususnya LPPM/Lemlit di Perguruan Tinggi. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Ristek dan Dikti disebutkan bahwa sumber pembiayaan lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia masih berasal dari anggaran Pemerintah. Padahal banyak sekali riset yang dibutuhkan oleh industri terutama dalam hal mengurangi ketergantungan mereka terhadap impor bahan baku (*raw material*). Sebagai suatu ilustrasi sederhana, Ada pertanyaan yang menggelikan, ditengah penduduk Indonesia yang masih sangat besar ketergantungannya terhadap beras, bawang, garam, kina, singkong saja kita masih harus impor?, Bagaimana Perguruan Tinggi yang berbasis Agriculture atau lembaga lembaga/pusat-pusat studi/peneliti baik milik pemerintah dan swasta? Manakah luaran dari hasil penelitian mereka setelah bertahun-tahun melakukan proses penelitian dengan dukungan dana yang tidak sedikit? Apakah penelitian mereka dapat dikembangkan dan diproduksi secara masal sehingga dapat masuk ke pasar industri?

Jadi setiap bisnis memerlukan inovasi agar usaha itu mampu bertahan, misalnya suatu bisnis yang memiliki merek perlu mendaftarkan mereknya jika tidak akan dibajak oleh orang lain; jika ada proses dalam bisnis maka perlu mempatenkannya agar terlindungi dari peniruan; jika ada produknya juga perlu diklaim dalam bentuk hak kekayaan intelektual (HKI) agar produk yang sama tidak muncul dan mematikan usaha yang telah dirintis dari awal (*first order*). HKI setiap hasil rekayasa baik yang wujud (*tangible*) maupun yang tidak wujud (*intangible*) perlu diadministrasikan dengan baik untuk mencegah benturan lain disebabkan oleh orang lain yang berkepentingan terhadap keuntungan semata. Semua itu memerlukan riset kembali untuk membuktikan bahwa tidak ada proses, kandungan, dan merek yang sama untuk suatu produk industri atau usaha. Demikian, riset memerlukan penerapan dan dipasarkan kepada masyarakat selain agar masyarakat dapat belajar dan juga masyarakat akan terlindungi dari segala sesuatu yang merusak tatanan kehidupannya. Setiap bisnis memerlukan inovasi untuk bertahan dan mengembangkan diri, ***tetapi inovasi tidak ada tanpa riset***, maka ***Salah satu tempat riset adalah dunia akademik.***

Simpulan

Keberpihakan pemerintah, masyarakat industri dan dunia pendidikan tinggi dalam mengelola riset dan pengembangan belumlah optimal. Hal ini dibuktikan oleh masih rendahnya proporsi dana riset dari PDB republik Indonesia. Sementara pada sisi lain, Dunia Pendidikan Tinggi juga belum memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap masalah penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan alokasi dana riset mandiri dan dana pendampingan manakala Perguruan Tinggi tersebut memperoleh hibah penelitian. Kondisi riset kita juga diperparah lagi dengan potensi adanya *miss-link* diantara mimpi periset dengan kebutuhan bisnis dan industri. Selain itu PT sebagai lembaga yang menyediakan sumberdaya peneliti (*Reseach or reseach lecturers*) baik secara kuantitatif (jumlahnya hanya 6.67% dari 240.000 dosen aktif) sebagai dosen peneliti, maupun secara kualitatif, dimana hal ini dapat dilihat dari jumlah diseminasi hasil riset, penyampaian dalam seminar internasional, dijadikan bahan rujukan (*citable document*) maupun dimuat dalam jurnal-jurnal ilmiah bereputasi Internasional yang masih jauh dari ideal.

Menurut penulis, arah kebijakan riset yang ideal adalah kebijakan riset yang mengarah pada luaran riset. Dengan kata lain, tidak ada lagi bidang fokus riset. Namun, para periset ditantang untuk menghasilkan suatu luaran riset yang telah diidentifikasi pemanfaatan dan/atau penerapannya. Pastinya, luaran riset yang dimaksud adalah suatu luaran riset yang benar-benar dibutuhkan oleh industri (*business need*). Inilah salah satu bukti adanya *miss-link* diantara apa yang menjadi mimpi dari riset atau lembaga riset atau lembaga penelitian dan pengembangan Perguruan Tinggi dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat industri, konsep hilirisasi yang saat ini sedang digagas oleh pemerintah semoga mampu mengurangi permasalahan yang membelit arah riset nasional. Semoga perubahan *mind set* riset Indonesia dari kebijakan riset *berbasis proses* ke kebijakan *riset berbasis luaran* juga akan mampu menjawab tantangan, sehingga pada akhirnya output riset mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, semoga***.

PERLUKAH IMPOR PROFESSOR ?

Oleh : Jaja Suteja

Publikasi yang dirilis dari *QS World University Rankings* baru-baru ini cukup mengejutkan Dunia Pendidikan Tinggi di Indonesia, betapa tidak dalam rilis QS untuk periode tahun 2016 tersebut, hanya menempatkan 2 (dua) Perguruan Tinggi (PT) Indonesia yang masuk dalam daftar 500 besar peringkat perguruan tinggi terbaik dunia. Rilis tersebut menyebabkan Menteri Ristek dan Dikti meradang dan merasakan kekecewaan yang amat dalam. Kegalauan yang dirasakan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini telah memunculkan *emotional/spontaneous ide* mengenai rencana **Impor Profesor** sebanyak 500 orang. Dalam rilis peringkat terakhir 2016 dari QS WUR tersebut, posisi peringkat perguruan tinggi Indonesia, antara lain: Universitas Indonesia (UI) menempati posisi ke-325, sementara Institut Teknologi Bandung (ITB) menempati posisi ke-401 dan Universitas Gajah Mada (UGM) berada pada posisi ke-501. Bandingkan dengan Malaysia, dimana Universiti Putra Malaysia (UPM) berada pada urutan ke-270, sementara itu

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) menempati posisi ke-288, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) urutan ke-302. Singapura dengan National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU) berada pada posisi/peringkat ke-12 dan ke-13 sebagai perguruan tinggi terbaik Dunia.

Sementara itu, rilis QS University Asia untuk periode yang sama, menempatkan 2 (dua) Perguruan Tinggi Singapura pada urutan pertama dan ketiga. *National University of Singapore* (NUS) menduduki peringkat pertama dengan nilai 100, sementara The University of Hongkong dengan nilai 98.5 menduduki urutan kedua dan Nanyang Technological University (NTU) Singapore menduduki urutan ketiga. Bagaimana dengan Perguruan Tinggi Indonesia, rilis QS Asia telah menempatkan UI pada urutan ke-67, ITB pada urutan ke-86 dan UGM pada urutan ke 105 serta UNAIR pada posisi ke -190.

Pada dasarnya instrument penilaian yang dipakai QS *World University Rankings* menggunakan 8 (delapan) instrumen pertimbangan penting, yaitu (i) *academic reputation*; (2) *employer reputation*; (3) *Faculty student*; (4) *Faculty staff with Ph.D*; (5) *Paper per-faculty*; (6) *International Student*; (7) *Inbound*

exchange dan (8) *Outbound Exchange*. Perlu diketahui, bahwa salah satu kriteria penting dari delapan kriteria tersebut adalah jumlah publikasi yang dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi/fakultas pada jurnal Internasional dalam tahun terakhir, termasuk dalam hal ini *paper per-faculty member*. Apabila kita analisis dan mengkonstelasikannya dengan *size faculty member*, dan *number of universties* (sekitar 4.500 PT) maka tidak ada alasan kita tertinggal di kawasan ASEAN, maka logika rasionalnya pada tataran ASEAN harusnya Indonesia *leading*, atau minimal masuk rangking 10 besar. Namun ketika menyaksikan fakta empiris angka publikasi yang ada (*published articles and citable documents*) sangatlah mengawatirkan, memang secara total jumlah publikasi internasional perguruan tinggi di Indonesia sangat mengejutkan tertinggal jauh dari perguruan tinggi di negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

Merujuk data yang bersumber pada SJR (*Scimago Journal Rank*) pada tahun 2016, maka Indonesia hanya memiliki *published articles* sebanyak 39.719 artikel, Thailand memiliki 123.410, Malaysia 181.251 dan Singapura memiliki 215.553 artikel. Jumlah publikasi kita hanya unggul sedikit dari Vietnam

29.238. Produktivitas akademisi kita hanya 18.43% dari Singapura, atau hanya 21.91% dari Malaysia dan 32.19% dari Thailand. Tentu kondisi demikian bukanlah berita menggembirakan, siapapun yang peduli terhadap perkembangan Pendidikan Tinggi (dikti) di Indonesia sangatlah menghawatirkan, boleh jadi termasuk Pak Menteri sebagai orang nomor satu di Kementerian ini, dan itu juga bisa jadi yang memicu munculnya wacana atau gagasan **Impor-Profesor**, untuk kemudian ditempatkan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, dengan harapan dapat meningkatkan peringkat perguruan tinggi tersebut. Ide ini bukanlah tanpa alasan dengan melihat data empiris pemeringkatan PT dan data jumlah publikasi ilmiah bisa saja diterima, ide ini sejalan dengan gagasan menteri sebelumnya mengenai **Impor Rektor**, yang telah Penulis ulas dalam Majalah Unpas (MU) edisi sebelumnya. Namun sekali lagi, statement pak menteri seringkali terjebak dan terkesan ide sesaat dan respon bersifat spontan.

Seperti halnya Pernyataan impor Rektor yang dilontarkan pak menteri beberapa waktu sebelumnya, ide atau wacana impor professor juga telah menuai banyak kritik dan komentar selain ada juga yang

mendukung terhadap kebijakan ini. Sebagian besar dosen atau pemerhati pendidikan tinggi yang mengkritisi menyampaikan argumen yang beragam, umumnya mereka sepakat bahwa masalah utama rendahnya produktivitas publikasi di jurnal internasional *bukan karena ada masalah dengan manajemen internal perguruan tinggi*. Sistem pendidikan kita-lah yang belum sepenuhnya mendukung. Adanya aturan administratif penelitian atau birokrasi pelaporan penelitian dipercayai banyak berkontribusi terhadap rendahnya rasio penelitian dosen di Indonesia, selain pemberlakuan secara konsisten terhadap *reward* dan *punishment* terhadap kinerja para dosen di Indonesia, sistem reward yang belum memadai.

Pada saat wacana impor rektor digulirkan beberapa waktu yang lalu, arus kritik dan komentar sangat signifikan sebelum program tersebut benar-benar dilaksanakan. Tidak seperti pernyataan sebelumnya, pernyataan Menristek dan dikti kali ini tidak banyak menuai banyak komentar. Namun demikian, berbagai pihak merasa *skeptis* terhadap ide impor professor tersebut. *Fakta bahwa fasilitas penelitian kita belum memadai menjadi suatu hal yang diyakini menjadi*

konsep, metode, algoritme atau pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan industri, sosial, pangan, teknologi dan lain-lain. Jadi semakin banyak *publikasi internasional bereputasi* yang dihasilkan oleh suatu negara dapat mengindikasikan bahwa semakin banyak persoalan baik itu persoalan industri sosial atau teknologi sebagaimana disebut di depan, yang dapat diselesaikan dengan pendekatan baru yang lebih efisien dan menguntungkan. Inilah mengapa suatu negara yang publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh PT atau lembaga Riset banyak berkorelasi dengan kemajuan Negara tersebut.

Lalu apa peran profesor dalam sebuah publikasi ilmiah? Di negara mana pun publikasi adalah **kerja tim** dengan **penggerak utama** publikasi adalah mahasiswa pascasarjana terutama mahasiswa **program Doktor**. Berbasis kompetensi dan pengalamannya, seorang profesor bertugas untuk memastikan bahwa mahasiswa pascasarjana dapat menghasilkan publikasi yang berkualitas. **Seorang profesor** yang berpengalaman di bidangnya tentu paham betul dalam menilai kebaruan atas penelitian dan atau naskah publikasi yang dihasilkan oleh mahasiswanya. Mungkin profesor yang kita punyai

saat ini belum dianggap mampu untuk melakukan hal ini, sehingga jumlah publikasinya tidak bisa banyak lalu berpikir untuk impor profesor.

Bayangkan seandainya Professor (3% dari jumlah dosen) dan Doktor (Lektor kepala-jumlahnya 16%) setahun mempublikasikan satu jurnal per-orang, maka setahun dipastikan ada publikasi sebanyak 34.810 artikel, maka hanya butuh 4 (empat) tahun saja PT di Indonesia bisa sejajar dengan PT yang ada di Singapura, seperti NUS dan NTU. Pertanyaannya sekali lagi, **KENAPA HAL INI BEGITU SULIT UNTUK DAPAT DIREALISASIKAN ?**. Jadi sebenarnya kalau hanya untuk meningkatkan jumlah publikasi internasional, sejumlah perguruan tinggi sudah menempuh berbagai cara diantaranya melalui : (i) *joint riset*, (ii) *joint publication* atau (iii) *joint supervisor*, dengan universitas di luar negeri yang bereputasi tanpa perlu mengimpor profesor. Akan tetapi agaknya cara tersebut belum dapat meningkatkan jumlah publikasi internasional karena tidak banyak perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkannya.

Kembali ke masalah *impor profesor*. Mempertimbangkan berbagai hal seperti penulis telah uraikan, pada dasarnya penulis kurang setuju

pemerintah membuka lowongan profesor bagi warga asing, ada banyak cara atau strategi bagaimana meningkatkan publikasi dosen Indonesia dalam publikasi jurnal internasional yang bereputasi. Beberapa strategi bisa ditempuh dengan supervisi yang konsisten, misalnya: (i) Penerapan bantuan atau hibah pendanaan riset melalui sistem insentif berbasis output.; (ii) Setiap publikasi/produk yang dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi diberikan insentif yang dapat kembali digunakan oleh perguruan tinggi untuk membangun atau menambah fasilitas riset yang lebih baik; (iii) Para peneliti tidak dibebani dengan sistem birokrasi administrasi yang panjang; (iv) institusi tempat bekerja para peneliti memberikan dukungan fasilitas administrasi untuk karir/jabatan fungsionalnya. Dengan demikian secara alami perguruan tinggi yang baik akan menjadi semakin kuat dan semakin meningkat jumlah publikasinya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi pengawasan dan evaluasi (*Monitoring and Evaluation*) baik internal maupun eksternal. Pengawasan dan Evaluasi perlu dilakukan secara ketat. Semoga, munculnya wacana impor profesor dapat menyadarkan kita semua serta mampu menciptakan sistem baru yang lebih baik. Sehingga

akan semakin banyak perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai reputasi di dunia Internasional, dan mampu menjadi *problem solver* bagi berbagai permasalahan yang ada di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya dapat memajukan bangsa Indonesia sejajar dengan negara lainnya. semoga***

MEMBANGUN BUDAYA AKADEMIK

Oleh : Jaja Suteja

Perguruan tinggi (PT) adalah *satuan pendidikan* penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut *mahasiswa*, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut *dosen*. Menurut UU Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 ayat (ii) maka yang dimaksud dengan Dosen adalah *pendidik profesional dan ilmuwan* dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di Indonesia, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dengan program pendidikan diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), dan spesialis (Sp). Sementara menurut jenisnya, maka penyelenggara pendidikan tinggi tersebut ada yang merupakan milik pemerintah (PTN) dan lainnya merupakan milik masyarakat (PTS).

Perguruan Tinggi merupakan suatu lingkungan pendidikan tinggi dengan proses/interaksi sosial yang terjadi *tidak bersifat eksklusif*. Dengan demikian, maka kampus merupakan komunitas atau entitas tersendiri yang kemudian dikenal dengan masyarakat akademik (*academic community*).

Seperti dalam lingkungan masyarakat luas pada umumnya, dimana terdapat aturan, norma dan nilai nilai luhur yang dipegang dan diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan beragam aktivitas, maka di dalam lingkungan kampus juga terdapat kegiatan-kegiatan dan tata aturan yang berbeda dengan komunitas lainnya. Oleh karena itu, kampus menjadi semacam lembaga akademik dan jalinan antar kampus (*universities or campuses networking*) cenderung memiliki suasana yang khas, yang kemudian dikenal dengan suasana akademik (*academic atmosphere*). Karena lingkungan masyarakat kampus bersifat *egalitarian* dan *non-ekklusif*, maka ia dicirikan dengan beragam pemikiran yang kritis, tidak berfihak/objektif, non-politis dan tidak bersifat partisan, bersifat analitis, kreatif dan konstruktif, terbuka untuk menerima masukan/kritik, menghargai waktu dan prestasi ilmiah, bebas dari

prasangka, membentuk mitra dialogis, memiliki dan menjunjung tinggi norma dan susila akademik serta selalu memegang tradisi ilmiah, dinamis, dan berorientasi kemasa depan.

Budaya Akademik

Hak milik yang paling berharga bagi suatu perguruan tinggi adalah kebebasan, otonomi, dan budaya akademik (*academic culture*). Dalam hal ini, perguruan tinggi harus mempunyai karakteristik yang khas dan menjadi panutan bagi masyarakat disekitar lingkungannya. Mengutip pendapat Khaerudin Kurniawan (2010) yang menyebutkan bahwa budaya akademik sebagai suatu *sub-sistem* perguruan tinggi memegang peranan penting dan krusial dalam upaya membangun dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakat (*civil society*) bangsa dan Negara pada umumnya. Indikator kualitas perguruan tinggi sekarang pada umumnya ditentukan oleh kualitas *civitas akademiknya* dalam mengembangkan dan membangun budaya akademiknya.

Pada dasarnya Budaya akademik merupakan *budaya universal*. Pemahaman mengenai universalitas ini megindikasikan bahwa setiap orang siapapun sebagai komunitas akademik memiliki hak yang sama untuk dapat melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik. Dengan demikian, membangun budaya akademik disuatu lingkungan Perguruan Tinggi, bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam kenyataanya sangat dibutuhkan suatu upaya yang sungguh sungguh terutama dalam tahap sosialisasi kegiatan akademik pada semua komponen masyarakat akademik, yakni dosen dan mahasiswa juga dukungan dari para tenaga kependidikan. Budaya akademik dalam sebuah institusi Perguruan Tinggi, sejatinya *tidaklah hadir secara tiba-tiba*, pada awalnya ia merupakan sesuatu yang dipaksakan oleh suatu aturan/norma. Selanjutnya aktivitas tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memeliharanya, seiring dengan berjalannya waktu maka ragam unik kegiatan yang terjalin menjadi suatu kebiasaan bahkan menjadi sebuah tradisi dan pada akhirnya menjadi budaya yang dicirikan adanya *share value* yang ada dilingkungan komunitas tersebut untuk tetap konsisten menjalankan norma-norma kegiatan

akademik tersebut. Pemilikan budaya akademik ini seharusnya menjadi idola bahkan rujukan/acuan/i-con semua insan akademisi perguruan tinggi, yakni *dosen dan mahasiswa*.

Masih menurut Khaerudin Kurniawan (2010) yang menyatakan bahwa secara mudah dapatlah dipahami dan disadari bahwa Perguruan Tinggi mampu berperan secara instrumental dalam mewujudkan upaya dan pencapaian budaya akademik yang dimaksud. Perguruan tinggi merupakan wadah pembinaan intelektualitas dan moralitas yang mendasari kemampuan penguasaan ipteks dan budaya dalam pengertian yang luas.

Dalam lingkup masyarakat akademik, maka telah menjadi satu aturan secara legal-formal bahwa derajat akademik tertinggi bagi seorang dosen adalah dicapainya kemampuan akademik pada tingkat guru besar (*professor*). Sedangkan derajat akademik bagi mahasiswa adalah apabila ia mampu mencapai prestasi akademik yang tinggi disertai beragam aktivitas kemahasiswaannya. Khusus bagi mahasiswa, faktor-faktor yang dapat menghasilkan prestasi akademik tersebut ialah: (i) *terprogramnya* kegiatan belajar, (ii) kiat untuk berburu referensi

aktual dan mutakhir, (iii) diskusi substansial perkembangan akademik, (iv) sumbangsih pemikiran mengenai masalah-masalah sosial kemasyarakatan, (v) diskusi mengenai kebangsaan demi terwujudnya masyarakat berkeadilan sosial dsb. Dengan melakukan aktivitas seperti itu diharapkan dapat dikembangkan suatu budaya mutu (*quality culture*) yang secara bertahap dapat menjadi kebiasaan dalam perilaku tenaga akademik dan mahasiswa dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, tanpa melakukan kegiatan-kegiatan akademik seperti penulis sebutkan pada bagian sebelumnya, maka sangatlah sulit seorang akademisi akan memperoleh nilai-nilai *normative* akademik yang luhur, yang mampu berperan sebagai *agent of change* maupun *agent of development*.

Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kurniawan (2013) dan Riko Arfian (2012) yang menyatakan bahwa budaya akademik dapat dipahami sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang *dihayati, dimaknai* dan *diamalkan* oleh warga masyarakat akademik, khususnya di lembaga pendidikan. Budaya akademik lebih cenderung diarahkan pada budaya kampus (*campus culture*)

yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan intelektual, tetapi juga kejujuran, kebenaran dan pengabdian kepada kemanusiaan, sehingga secara keseluruhan budaya kampus adalah *budaya dengan nilai-nilai karakter positif*. Merujuk deskripsi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa nilai-nilai utama karakter inilah yang sebenarnya menjadi penyokong utama dalam proses terciptanya budaya akademik. Budaya ini seharusnya melekat dalam diri semua insan akademisi perguruan tinggi, baik itu dosen ataupun mahasiswa. Karena, pada dasarnya budaya akademik juga merujuk pada *cara hidup masyarakat ilmiah yang majemuk dan multikultural* yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan objektivitas.

Membangun Budaya Akademik

Apabila kita mencoba mendengar berbagai obrolan masyarakat awam yang terjadi dikedai-kedai atau diteras-teras kopi sebagai pelengkap diskusi permasalahan rumitnya romantika kehidupan, sampai diskusi formal yang dilakukan oleh para pakar dan akademisi yang diselenggarakan dalam suatu forum diskusi terbuka yang membahas mengenai permasalahan Budaya Akademik yang berkembang

di Indonesia, maka dapatlah disampaikan *beberapa poin penting* berkenaan dengan perkembangan dan konstruksi budaya akademik, diantaranya :

1) **Konsep dan Ciri-Ciri Perkembangan Budaya Akademik**

Dalam situasi yang sarat idealisme, rumusan konsep dan pengertian tentang budaya akademik yaitu budaya atau sikap hidup yang selalu berupaya mencari *kebenaran ilmiah* melalui kegiatan akademik dicirikan dengan berkembangnya *kebebasan berpikir, keterbukaan, pikiran kritis-analitis, rasional dan obyektif* oleh warga masyarakat akademik. Konsep dan pengertian tentang budaya akademik tersebut didukung perumusan karakteristik perkembangannya yang disebut "*Ciri-Ciri Perkembangan Budaya Akademik*" yang meliputi berkembangnya kegiatan-kegiatan :

- (1) penghargaan terhadap pendapat orang lain secara obyektif;
- (2) pemikiran rasional dan kritis-analitis dengan tanggungjawab moral;
- (3) kebiasaan membaca;
- (4) penambahan ilmu dan wawasan;
- (5) kebiasaan meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat;
- (6) penulisan artikel, makalah, buku;
- (7)

diskusi ilmiah; (8) proses belajar-mengajar, dan (9) manajemen perguruan tinggi yang baik.

2) Tradisi Akademik

Secara umum, yang dimaksud dengan tradisi akademik adalah ciri khas kehidupan masyarakat akademik dengan menjalankan proses belajar-mengajar antara dosen dan mahasiswa, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan cara-cara berpikir kritis-analitis, rasional dan inovatif di lingkungan masyarakat akademik. Ciri tersebut dalam masyarakat akademis dikenal sebagai "*Tridarma Perguruan Tinggi*", dalam perkembangan berikutnya, maka ada darma yang menjadi tambahan yaitu aktivitas publikasi dari karya kreatif ilmiah yang mampu mereka hasilkan. Tradisi menyelenggarakan proses belajar-mengajar antara guru dan murid, antara pandito dan cantrik, antara kiai dan santri sudah mengakar sejak ratusan tahun yang lalu, melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti padepokan dan pesantren. Akan tetapi tradisi-tradisi lain seperti *menyelenggarakan penelitian* adalah tradisi baru. Demikian pula, *tradisi berpikir kritis-analitis, rasional dan inovatif* adalah sebuah

kemewahan yang tidak terjangkau tanpa terjadinya perubahan dan pembaharuan sikap mental dan tingkah laku yang harus terus-menerus diinternalisasikan dan disosialisasikan dengan menggerus sikap mental *paternalistik dan ewuh-pakewuh* yang berlebih-lebihan pada sebagian masyarakat akademik yang mengidap tradisi lama, terutama dalam paradigma *patron-client relationship* yang akut.

3) Kebebasan Akademik

Manusia, pada umumnya merindukan kebebasan, kebebasan berbicara, kebebasan dari rasa takut dan beragam jenis kebebasan lainnya seperti yang direkomendasikan *United Nation*. Namun kebebasan dalam dunia atau masyarakat akademik, tentu saja memiliki pengertian dan pemaknaan yang spesifik. Kebebasan Akademik adalah Kebebasan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi anggota sivitas akademika (mahasiswa dan dosen) untuk bertanggungjawab dan mandiri yang berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengembangan iptek dan seni yang mendukung pembangunan nasional. Kebebasan akademik meliputi: (i) kebebasan menulis, (ii) meneliti, (iii) menghasilkan karya keilmuan, (iv) menyampaikan

pendapat, (v) pikiran, (vi) gagasan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, dalam kerangka akademis.

Kebebasan Akademik tersebut akan mengiringi tradisi intelektual masyarakat akademik, tetapi kehidupan dan kebijakan politik seringkali mempengaruhi dinamika dan perkembangannya. Dalam rezim pemerintahan yang otoriter, kiranya kebebasan akademik akan sulit berkembang. Dalam kepustakaan internasional kebebasan akademik dipandang sebagai inti dari budaya akademik dan berkaitan dengan kebebasan itu sendiri. Dalam masyarakat akademik di Indonesia, kebebasan akademik yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat telah mengalami penderitaan yang cukup panjang, selama puluhan tahun diwarnai oleh pelarangan dan pembatasan kegiatan akademik di era pemerintahan orde baru misalnya. Namun bisa saja kebebasan itu menjadi tidak tak terkendali seperti yang dirasakan saat ini. Kini kebebasan akademik telah berkembang seiring terjadinya pergeseran pemerintahan dari era atau orde baru ke orde reformasi, bahkan hampir tak terbatas dan tak bertanggungjawab, sehingga menyulitkan dalam mengendalikan perkembangan kebebasan

berpendapat itu sendiri. **Pertanyaannya**, apakah ini yang diharapkan dan yang dimaksud dengan era kebebasan, termasuk kebebasan dalam masyarakat akademik ?.

4) Suasana Akademik

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi tujuan serta sasarannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Suasana akademik yang kondusif ini tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana "*feeling at home*". Proses tersebut akan melibatkan sumberdaya pendidikan (dosen, fasilitas atau sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum yang mampu memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran). Sumber daya pendidikan perlu dirancang dan dikelola dengan standar mutu tertentu agar menimbulkan kegairahan bagi para pembelajar, meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kesungguhan untuk menjamin tercapainya standar mutu proses pembelajaran.

Kurniawan (2013), mengemukakan bahwa atmosfer akademik yang ideal bisa digambarkan dengan berbagai aktivitas kegiatan di lingkungan kampus yang ditandai oleh interaksi harmonis antara dosen-mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan dosen dengan dosen yang berlandaskan nilai-nilai akademis. Pemahaman terhadap pengembangan atmosfer akademik diharapkan akan membentuk karakter mahasiswa sebagai makhluk intelektual yang berkualitas akademik. Dalam membangun atmosfer akademik diperlukan suasana akademik dan budaya yang kondusif, hal ini akan terbentuk secara bertahap dan tentu semua melalui proses komunikasi yang harmonis.

5) Etika Akademik

Berbicara tentang suasana akademik akan membawa kita pada sebuah kata kunci yang menjadi pijakan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu *etika* dan *moral akademik*. Pengertian etika dan atau moral akademik pada intinya adalah menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Namun demikian, pengertian ini juga sering dikaitkan dengan "*norma*", yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok ukur

mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, etika akan memberikan batasan yang mengatur akan pergaulan manusia dalam kelompok sosialnya. Batasan itu berupa ketentuan-ketentuan yang menyatakan perilaku yang diharapkan dari anggota sivitas akademika perguruan tinggi ketika mereka berbuat, berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran.

Simpulan

Penciptaan kultur lembaga yang mendukung terciptanya budaya akademik, dimana semua "elit" akademik harus memberikan contoh dan teladan, serta bimbingan yang baik bagi semua mahasiswanya (*leadership by example*).

Budaya akademik sebagai suatu *sub-sistem* perguruan tinggi memegang peranan penting dan krusial dalam upaya membangun dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakat, namun sebelum masyarakat akademik mampu berperan sebagai agen perubahan dan pembangunan, maka sejatinya mereka sendiri yang harus mampu melakukan banyak perubahan dengan

berdasar pada norma norma luhur akademik, dengan **menggerus** sikap mental **paternalistik** dan **ewuh-pakewuh** yang berlebih-lebihan pada sebagian masyarakat akademik yang mengidap tradisi lama, terutama dalam paradigma **patron-client relationship** yang akut.***

